

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT  
TAHUN 2011



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**



# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 LATAR BELAKANG

Pertanggungjawaban kegiatan pemerintahan dan pembangunan di masa datang yang lalu lebih difokuskan pada pertanggungjawaban keuangan. Pengalaman menunjukkan bahwa banyak kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang pertanggungjawaban keuangannya diterima tanpa syarat, ternyata di kemudian hari hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat pada umumnya, baik dilihat dari hasil maupun dampak dari kegiatan tersebut. Menyadari kekeliruan dimasa yang lalu dan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan agar lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, serta sebagai upaya mewujudkan *good governance*, telah dikeluarkan Instruksi Presiden nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Instruksi Presiden nomor 7 Tahun 1999 tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk melaksanakan akuntabilitas kinerjanya dan menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan organisasi.

Sebagai implementasi dari Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 telah diterbitkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 689/JX/6/Y/1 999 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah, pada tahun 2002 yang kemudian disempurnakan lagi menjadi Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah.

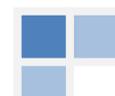
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 disusun sebagai gambaran tolok ukur keberhasilan/kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama tahun anggaran 2011.



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada dasarnya mencoba mengkomunikasikan pencapaian kinerja dikaitkan dengan sejauh mana organisasi telah melakukan upaya-upaya stratejik dan operasional di dalam mencapai tujuan/sasaran stratejiknya dalam kerangka pemenuhan visi dan misi yang telah ditetapkan. Visi dan misi organisasi serta tujuan stratejik organisasi telah diformalkan di dalam suatu Rencana Stratejik yang memiliki rentang waktu 5 tahun. Kemudian untuk capaian yang harus dipenuhi setiap tahunnya dalam periode 5 tahun tersebut, di dalam Rencana Stratejik ditetapkan sejumlah Sasaran Stratejik. Pemenuhan atas sasaran stratejik ini setiap tahunnya akan berakumulasi pada pencapaian tujuan stratejik organisasi di akhir tahun kelima. Alur pikirnya adalah apabila tujuan stratejik organisasi telah dipenuhi maka organisasi tersebut dapat dipersiapkan telah memenuhi visi dan misinya.

Dasar Hukum Pelaksanaan LAKIP adalah sebagai berikut:

1. UU No.28/1999: Penyelenggaraan Negara Yang Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta berbagai peraturan perundangan lainnya dan berbagai peraturan turunannya;
4. Inpres No. 7/1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  
Peraturan ini mengamanatkan agar setiap unit kerja instansi pemerintah mulai eselon II ke atas menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
5. Inpres No. 5/2004: Percepatan Pemberantasan Korupsi;  
Inpres ini mengamanatkan Kementerian PAN dan RB untuk mengkoordinasikan pelaksanaannya di berbagai instansi pemerintah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.  
Peraturan ini mewajibkan setiap instansi pemerintah baik di pusat maupun daerah menyusun suatu laporan keuangan dan laporan kinerja yang terintegrasi dengan berbagai sistem manajemen pemerintahan lainnya;



7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)  
Peraturan ini mengamanatkan Kementerian PAN dan RB untuk mengoordinasikan pelaksanaannya di berbagai instansi pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  
Pedoman ini dapat dipergunakan sebagai acuan bagi setiap instansi pemerintah dalam menyusun dokumen Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi yang bersangkutan.

## 1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tahun 2011 disusun sebagai salah satu perwujudan pertanggungjawaban atas hasil pelaksanaan tugas dalam tahun 2011. Disamping sebagai bentuk pelaksanaan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999.

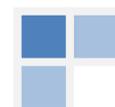
Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dimaksudkan untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebagai salah satu syarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.

Tujuan yang hendak dicapai adalah:

1. Menjadikan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebagai instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya;
2. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah;
3. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional;
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

## 1.3. RUANG LINGKUP

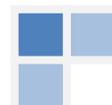
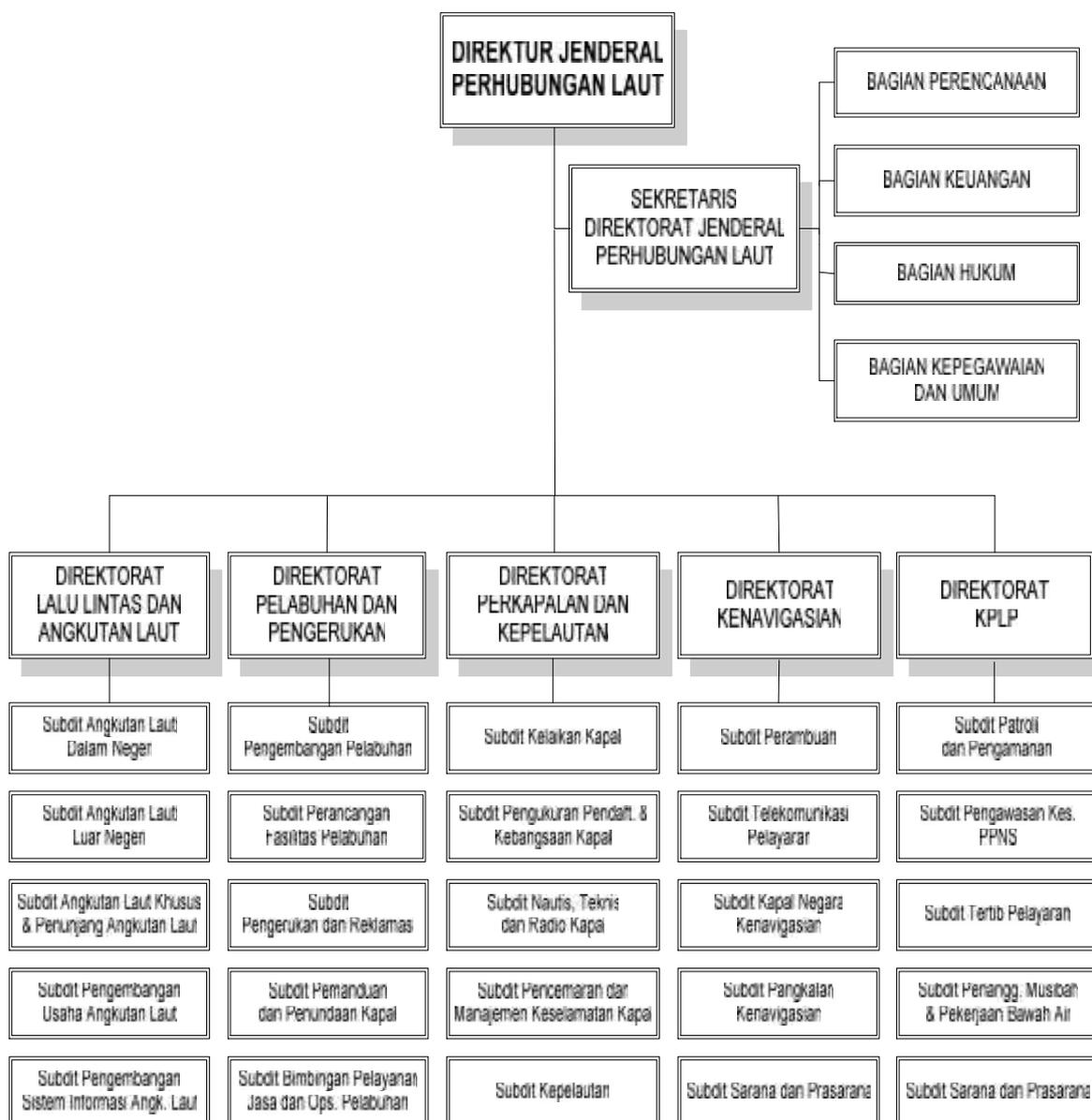
Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut ini mencakup pelaksanaan tugas administrasi dan teknis penyelenggaraan transportasi laut selama periode tahun anggaran 2011 yaitu sampai dengan posisi 31 Desember 2011.



#### 1.4 TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DITJEN HUBLA

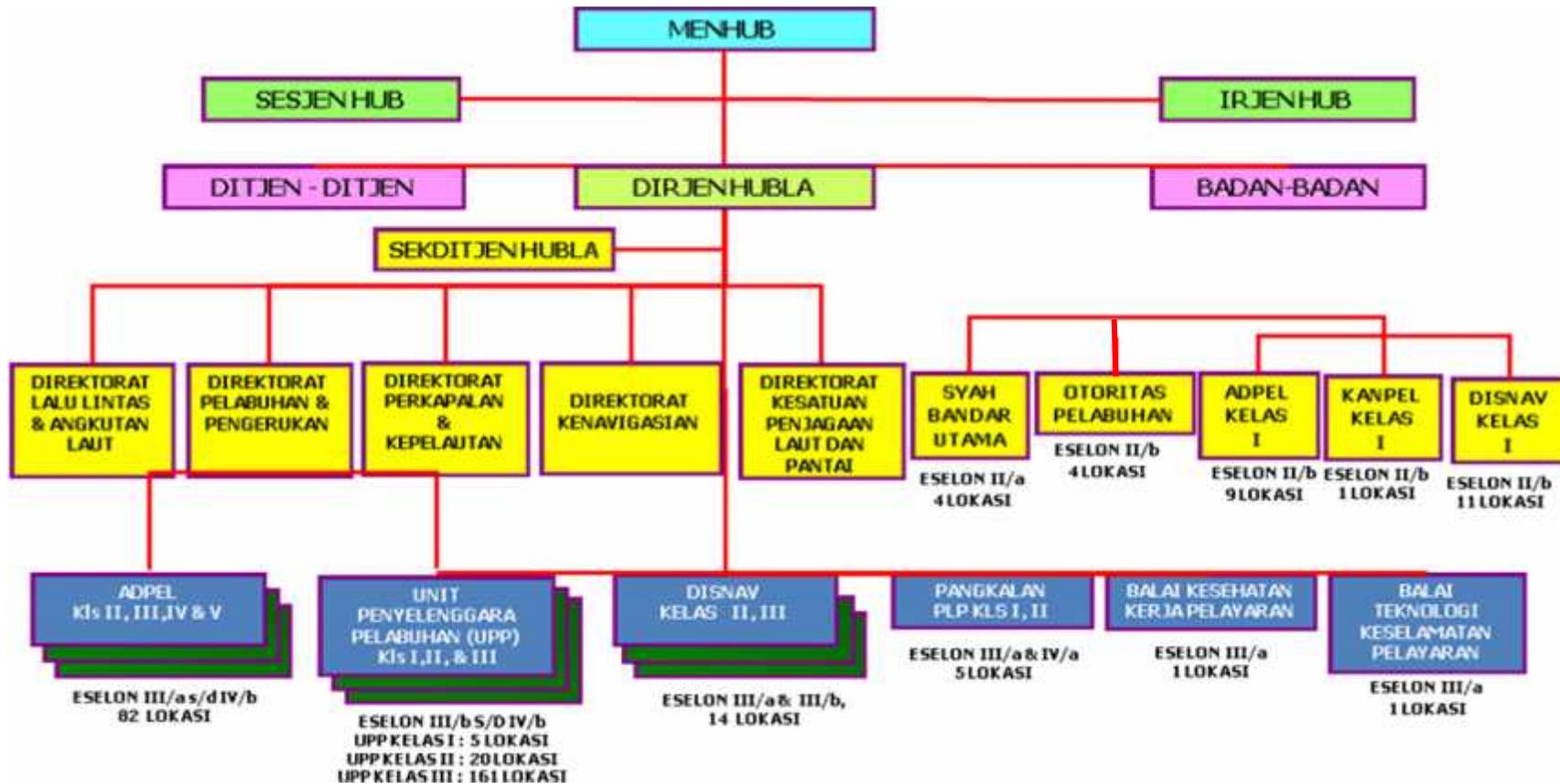
Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, struktur organisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut digambarkan sebagai berikut:

#### STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT (KM. 60 TAHUN 2010)



### 1.4.1 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut setelah Reformasi Kelembagaan

#### STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan



## STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT



### 1.4.2. Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Ditjen Hubla

#### a. Tugas Pokok Ditjen Hubla

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menyelenggarakan sebagian tugas pokok Kementerian Perhubungan, dan merumuskan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perhubungan laut berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.



**b. Fungsi Ditjen Hubla**

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan Departemen Perhubungan di bidang lalu lintas dan angkutan laut, pelabuhan dan pengerukan, perkapalan dan kepelautan, kenavigasian serta kesatuan penjagaan laut dan pantai;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan laut, pelabuhan dan pengerukan, perkapalan dan kepelautan, kenavigasian serta kesatuan penjagaan laut dan pantai;
- 3) Perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang perhubungan laut;
- 4) Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi;
- 5) Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

**c. Susunan Organisasi Ditjen Hubla**

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terdiri dari :

- 1) Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- 2) Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut;
- 3) Direktorat Pelabuhan dan Pengerukan;
- 4) Direktorat Perkapalan dan Kepelautan;
- 5) Direktorat Kenavigasian;
- 6) Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai

**1) Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut****a) Tugas Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut**

Memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

**b) Fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut**

- 1) Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana dan program, statistik serta bimbingan pelaksanaan program organisasi, sistem dan prosedur kerja;
- 2) Pengelolaan urusan keuangan dan inventarisasi kekayaan milik negara;



- 3) Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pemberian pertimbangan dan bantuan hukum kepada semua unit serta pelaksanaan hubungan kerjasama luar negeri dan hubungan masyarakat;
- 4) Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga dan pengelolaan perlengkapan serta urusan kepegawaian.
- 5) Penelaahan, evaluasi dan koordinasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan fungsional dan laporan masyarakat.

**c) Susunan Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut**  
Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terdiri dari:

- a. Bagian Perencanaan;
- b. Bagian Keuangan;
- c. Bagian Hukum;
- d. Bagian Kepegawaian dan Umum.

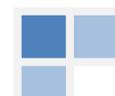
**a. Bagian Perencanaan**

**1) Tugas Bagian Perencanaan**

Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, perumusan kebijakan, penataan organisasi dan tata laksana serta evaluasi dan pelaporan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

**2) Fungsi Bagian Perencanaan**

- a. Pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana, perumusan bahan kebijakan, pengumpulan dan pengolahan data dan informasi, hubungan antar lembaga, penyusunan pedoman, standar dan rencana usaha kemitraan;
- b. Pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program dan anggaran, rancangan rencana kerja (RENJA), rencana kerja dan anggaran (RKA), konsep dokumen pelaksanaan anggaran, serta penyusunan program kerja sama teknik dan pinjaman/hibah luar negeri.



- c. Pelaksanaan penyiapan bahan bimbingan dan penataan organisasi dan tata laksana, penyiapan bahan koordinasi kebijakan dan penetapan tarif, penyusunan rencana dan evaluasi kinerja serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

## **b. Bagian Keuangan**

### **1) Tugas Bagian Keuangan**

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan dan inventarisasi barang inventaris milik/kekayaan negara di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

### **2) Fungsi Bagian Keuangan**

- a. Pelaksanaan penyiapan proses pengesahan konsep dokumen pelaksanaan anggaran menjadi dokumen pelaksanaan anggaran, penyusunan rencana dan administrasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, revisi anggaran dan pemantauan anggaran serta penyiapan petunjuk pelaksanaan anggaran;
- b. Pelaksanaan dan penyiapan bahan pembinaan perbendaharaan dan tata usaha keuangan, pemantauan, penilaian dan penyusunan laporan realisasi anggaran dan neraca, serta tindak lanjut penyelesaian temuan dan pemantauan laporan hasil pemeriksaan aparat pengawas;
- c. Pelaksanaan verifikasi, pembukuan dan perhitungan anggaran, penyiapan bahan pembinaan dan pengelolaan administrasi perlengkapan, penyelesaian tuntutan perbendaharaan (TP) dan tuntutan ganti rugi (TGR).



**c. Bagian Hukum****1) Tugas Bagian Hukum**

Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan telaahan hukum dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan bantuan dan penyuluhan hukum serta urusan kerjasama luar negeri dan hubungan masyarakat.

**2) Fungsi Bagian Hukum**

- a. Penyiapan telaahan dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan bantuan hukum dan penyuluhan peraturan perundang-undangan serta dokumentasi hukum;
- c. Pelaksanaan urusan hubungan masyarakat dan penyiapan bahan pertimbangan urusan kerjasama luar negeri di bidang perhubungan laut.

**d. Bagian Kepegawaian dan Umum****1) Tugas Bagian Kepegawaian dan Umum**

Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

**2) Fungsi Bagian Kepegawaian dan Umum**

- a. Penyusunan rencana kebutuhan, pengembangan karir pegawai dan pengelolaan basis data kepegawaian serta analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai;
- b. Pelaksanaan urusan mutasi, kesejahteraan dan disiplin pegawai;
- c. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan dan keprotokolan.



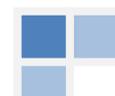
## 2) **Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut**

### a) **Tugas Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut**

Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan dibidang lalu lintas dan angkutan laut dalam negeri, luar negeri, angkutan laut khusus, pengembangan usaha angkutan laut serta pengembangan sistem dan informasi angkutan laut.

### b) **Fungsi Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut**

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang tarif angkutan laut, angkutan laut dalam negeri dan luar negeri, angkutan laut khusus, pengembangan usaha angkutan laut dan penunjang angkutan laut, pengembangan sistem dan informasi angkutan laut;
- b. Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang tarif angkutan laut dalam negeri dan luar negeri, angkutan laut khusus, pengembangan usaha angkutan laut dan penunjang angkutan laut, pengembangan sistem dan informasi angkutan laut;
- c. Penyiapan perumusan dan pemberian bimbingan teknis di bidang tarif angkutan laut dalam negeri dan luar negeri, angkutan laut khusus, pengembangan usaha angkutan laut dan penunjang angkutan laut, pengembangan sistem dan informasi angkutan laut;
- d. Penyiapan pemberian perijinan penyelenggaraan usaha pelayaran antar propinsi dan atau internasional dan ijin operasi angkutan laut khusus serta penetapan syarat bendera kapal asing yang beroperasi di perairan Indonesia dan persyaratan agen umum dan perwakilan perusahaan pelayaran asing;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tarif angkutan laut dalam negeri dan luar negeri, angkutan laut khusus, pengembangan usaha angkutan laut dan penunjang angkutan laut, pengembangan sistem dan informasi angkutan laut;
- f. Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian dan rumah tangga Direktorat.



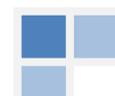
### **3) Direktorat Pelabuhan dan Pengerukan**

#### **a) Tugas Direktorat Pelabuhan dan Pengerukan**

Direktorat Pelabuhan dan Pengerukan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan pelabuhan dan perancangan fasilitas pelabuhan, pengerukan dan reklamasi, pemanduan dan penundaan kapal, bimbingan pelayanan jasa dan operasional pelabuhan.

#### **b) Fungsi Direktorat Pelabuhan dan Pengerukan**

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan pelabuhan dan perancangan fasilitas pelabuhan, pengerukan dan reklamasi, pemanduan dan penundaan kapal, bimbingan pelayanan jasa dan operasional pelabuhan;
- b. Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pengembangan pelabuhan dan perancangan fasilitas pelabuhan, pengerukan dan reklamasi, pemanduan dan penundaan kapal, bimbingan pelayanan jasa dan operasional pelabuhan;
- c. Penyiapan perumusan dan pemberian bimbingan teknis di bidang pengembangan pelabuhan dan perancangan fasilitas pelabuhan, pengerukan dan reklamasi, pemanduan dan penundaan kapal, bimbingan pelayanan jasa dan operasional pelabuhan;
- d. Penyiapan pemberian perijinan dan standarisasi penyelenggaraan pengembangan pelabuhan dan perancangan fasilitas pelabuhan, pengerukan dan reklamasi, pemanduan dan penundaan kapal, bimbingan pelayanan jasa dan operasional pelabuhan;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan pelabuhan dan perancangan fasilitas pelabuhan, pengerukan dan reklamasi, pemanduan dan penundaan kapal, bimbingan pelayanan jasa dan operasional pelabuhan;
- f. Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian dan rumah tangga Direktorat.



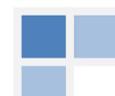
#### 4) **Direktorat Perkapalan dan Kepelautan**

##### a) **Tugas Direktorat Perkapalan dan Kepelautan**

Direktorat perkapalan dan Kepelautan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang kelaikan kapal, pengukuran, pendaftaran dan kebangsaan kapal, nautis, teknis dan radio kapal, pencemaran dan manajemen keselamatan kapal dan kepelautan.

##### b) **Fungsi Direktorat Perkapalan dan Kepelautan**

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang rancang bangun dan kelaikan kapal, pengukuran, pendaftaran dan kebangsaan kapal, nautis, teknis dan radio kapal, pencemaran dan manajemen keselamatan kapal, pembersihan tangki kapal (*Tank Cleaning*), perbaikan dan pemeliharaan (*Floating and Running Repair*) kapal, penetapan standar, pengujian dan sertifikasi kepelautan;
- b. Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang rancang bangun dan kelaikan kapal, pengukuran, pendaftaran dan kebangsaan kapal, nautis, teknis dan radio kapal, pencemaran dan manajemen keselamatan kapal, pembersihan tangki kapal (*Tank Cleaning*), perbaikan dan pemeliharaan (*Floating and Running Repair*) kapal, penetapan standar, pengujian dan sertifikasi kepelautan;
- c. Penyiapan perumusan dan pemberian bimbingan teknis di bidang rancang bangun dan kelaikan kapal, pengukuran, pendaftaran dan kebangsaan kapal, nautis, teknis dan radio kapal, pencemaran dan manajemen keselamatan kapal, pembersihan tangki kapal (*Tank Cleaning*), perbaikan dan pemeliharaan (*Floating and Running Repair*) kapal, penetapan standar, pengujian dan sertifikasi kepelautan;
- d. Penerbitan sertifikat keselamatan kapal, pencegahan pencemaran dari kapal, kepelautan, manajemen keselamatan kapal (*ISM Code*), surat ukur kapal dan surat tanda kebangsaan kapal dalam rangka penyelenggaraan kelaiklautan kapal dan daftar riwayat kapal (*Continuous Synopsis Record*);



- e. Pengesahan gambar rancang bangun kapal, perhitungan stabilitas kapal, lambung timbul kapal, daftar ukur kapal, pencegahan pencemaran kapal, program lembaga pendidikan dan pelatihan kepelautan, sertifikat kepelautan dan panduan muatan dalam rangka pemenuhan persyaratan kelaiklautan kapal;
- f. Penerbitan surat persetujuan penggunaan/penggantian nama kapal, surat penetapan, tanda panggilan (*call sign*) kapal, surat keterangan status hukum kapal dan surat keterangan penghapusan kapal dari pendaftaran;
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang rancang bangun kapal dan sertifikasi kapal, standar pengujian dan sertifikasi kepelautan, pengawakan kapal dan dokumen pelaut, keselamatan kapal dan manajemen keselamatan kapal, pengukuran dan surat ukur kapal, pendaftaran dan tanda kebangsaan kapal, jaminan ganti rugi pencemaran laut oleh minyak dari kapal;
- h. Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian dan rumah tangga Direktorat.

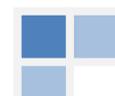
## 5) Direktorat Kenavigasian

### a) Tugas Direktorat Kenavigasian

Direktorat Kenavigasian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang perambuan, telekomunikasi pelayaran, kapal negara, pangkalan kenavigasian serta sarana dan prasarana kenavigasian.

### b) Fungsi Direktorat Kenavigasian

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perambuan, telekomunikasi pelayaran, kapal negara dan pangkalan kenavigasian, sarana dan prasarana kenavigasian;
- b. Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang perambuan, telekomunikasi pelayaran, kapal negara dan pangkalan kenavigasian, sarana dan prasarana kenavigasian;



- c. Penyiapan perumusan dan pemberian bimbingan teknis di bidang perambuan, telekomunikasi pelayaran, kapal negara dan pangkalan kenavigasian, sarana dan prasarana kenavigasian;
- d. Penyiapan pemberian perijinan dan pelayanan dalam penyelenggaraan perambuan dan telekomunikasi pelayaran;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perambuan, telekomunikasi pelayaran, kapal negara dan pangkalan kenavigasian, sarana dan prasarana kenavigasian;
- f. Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian dan rumah tangga Direktorat.

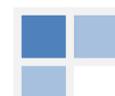
**6) Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai**

**a) Tugas Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai**

Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang patroli dan pengamanan, pengawasan keselamatan dan penyidikan pegawai negeri sipil, tertib pelayaran, penanggulangan musibah dan pekerjaan bawah air, sarana dan prasarana penjagaan laut dan pantai.

**b) Fungsi Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai**

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang patroli dan pengamanan, pengawasan keselamatan dan penyidikan pegawai negeri sipil, tertib pelayaran, penanggulangan musibah dan pekerjaan bawah air, sarana dan prasarana penjagaan laut dan pantai;
- b. Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang patroli dan pengamanan, pengawasan keselamatan dan penyidikan pegawai negeri sipil, tertib pelayaran, penanggulangan musibah dan pekerjaan bawah air, sarana dan prasarana penjagaan laut dan pantai;
- c. Penyiapan perumusan dan pemberian bimbingan teknis di bidang patroli dan pengamanan, pengawasan keselamatan dan penyidikan pegawai negeri sipil, tertib pelayaran, penanggulangan musibah dan pekerjaan bawah air, sarana dan prasarana penjagaan laut dan pantai;



- d. Penyiapan pelaksanaan di bidang patroli dan pengamanan, pengawasan keselamatan dan penyidikan pegawai negeri sipil, tertib pelayaran, penanggulangan musibah dan pekerjaan bawah air, sarana dan prasarana penjagaan laut dan pantai;
- e. Pembinaan teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut serta penyusunan dan pemberian kualifikasi teknis sumber daya manusia di bidang patroli dan pengamanan, pengawasan keselamatan dan penyidikan pegawai negeri sipil, tertib pelayaran, penanggulangan musibah dan pekerjaan bawah air dan pemberian perijinan;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang patroli dan pengamanan, pengawasan keselamatan dan penyidikan pegawai negeri sipil, tertib pelayaran, penanggulangan musibah dan pekerjaan bawah air, sarana dan prasarana penjagaan laut dan pantai;
- g. Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian dan rumah tangga Direktorat.

## 7) Tugas dan Fungsi kelembagaan baru di lingkungan Ditjen Hubla

### a) *Otoritas Pelabuhan*

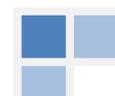
Otoritas Pelabuhan mempunyai Fungsi sebagai pengaturan dan pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial dengan beberapa tugas sebagai berikut:

### b) *Syahbandar*

*Syahbandar* mempunyai Fungsi sebagai pelaksanaan, pengawasan dan penegakan hukum di bidang angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan perlindungan lingkungan maritim di pelabuhan dengan beberapa tugas sebagai berikut:

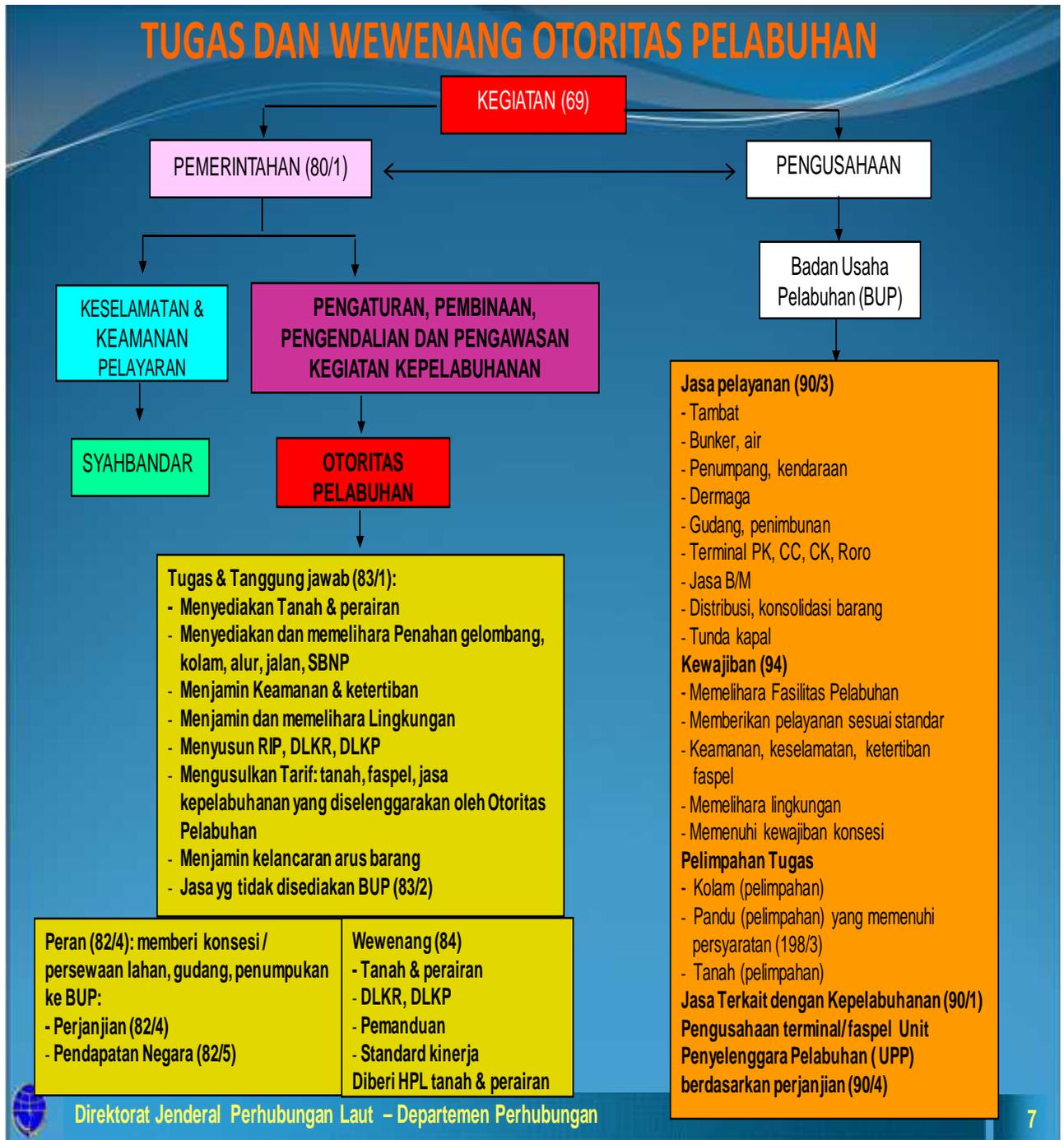
### c) *Unit Penyelenggara Pelabuhan*

*Unit Penyelenggara Pelabuhan* mempunyai Fungsi sebagai Pengaturan, pengendalian, pengawasan kegiatan kepelabuhanan, dan pemberian pelayanan jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial



**d) *Sea and Coast Guard***

Sea and Coast Guard mempunyai Fungsi sebagai Penjagaan dan penegakan peraturan perundang-undangan di laut dan pantai





## BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA DITJEN HUBLA TAHUN 2011

### 2.1 PERENCANAAN STRATEGIS

#### 2.1.1 RENSTRA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2010 – 2014

**Visi Kementerian Perhubungan adalah “Terwujudnya pelayanan transportasi yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah.”**

Pelayanan transportasi yang handal, diindikasikan oleh penyelenggaraan transportasi yang aman (*security*), selamat (*safety*), nyaman (*comfortable*), tepat waktu (*punctuality*), terpelihara, mencukupi kebutuhan, menjangkau seluruh pelosok tanah air serta mampu mendukung pembangunan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pelayanan transportasi yang berdaya saing diindikasikan oleh penyelenggaraan transportasi yang efisien, dengan harga terjangkau (*affordability*) oleh semua lapisan masyarakat, ramah lingkungan, berkelanjutan, dilayani oleh SDM yang profesional, mandiri dan produktif.

Pelayanan transportasi yang memberikan nilai tambah diindikasikan oleh penyelenggaraan perhubungan yang mampu mendorong pertumbuhan produksi nasional melalui iklim usaha yang kondusif bagi berkembangnya peranserta masyarakat, usaha kecil, menengah dan koperasi, mengendalikan laju inflasi melalui kelancaran mobilitas orang dan distribusi barang ke seluruh pelosok tanah air, sehingga mampu memberikan kontribusi bagi percepatan pertumbuhan ekonomi nasional serta menciptakan lapangan kerja terutama pada sektor-sektor andalan yang mendapat manfaat dari kelancaran pelayanan transportasi.



Untuk mencapai visi tersebut, dirumuskan misi sebagai berikut:

***Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi***

Dalam upaya mengurangi/menurunkan tingkat kecelakaan dari sektor transportasi ditengah kondisi keuangan negara yang masih diliputi krisis keuangan global, pemerintah terus berupaya secara bertahap membenahi sistem keselamatan dan keamanan transportasi menuju kondisi *zero to accident*.

***Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah***

Kebutuhan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi yang perlu mendapatkan perhatian adalah aksesibilitas di kawasan pedesaan, kawasan pedalaman, kawasan tertinggal termasuk kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar yang masih menjadi tanggungjawab pemerintah.

***Meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi***

Untuk mendukung keberhasilan pembangunan nasional, perlu diupayakan peningkatan kinerja pelayanan jasa transportasi menuju kepada kondisi yang dapat memberikan pelayanan optimal bagi masyarakat, sejalan dengan pemulihan pasca krisis keuangan global, melalui rehabilitasi dan perawatan sarana dan prasarana transportasi.

***Melanjutkan konsolidasi melalui restrukturisasi dan reformasi di bidang peraturan, kelembagaan, sumber daya manusia (SDM), dan penegakan hukum secara konsisten***

Restrukturisasi di bidang kelembagaan, menempatkan posisi Kementerian Perhubungan sebagai regulator dan melimpahkan sebagian kewenangan di bidang perhubungan kepada daerah dalam bentuk dekonsentrasi, desentralisasi dan tugas pembantuan. Reformasi di bidang regulasi (*regulatory reform*) diarahkan kepada penghilangan restriksi yang memungkinkan swasta berperan secara penuh dalam penyelenggaraan jasa transportasi. Penegakan hukum dilakukan secara konsisten dengan melibatkan



peranserta masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan jasa transportasi. Restrukturisasi dan reformasi di bidang SDM diarahkan kepada pembentukan kompetensi dan profesionalisme insan perhubungan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memiliki wawasan global dengan tetap mempertahankan jatid dirinya sebagai manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

***Mewujudkan pengembangan teknologi transportasi yang ramah lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim***

Peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan dalam penyelenggaraan jasa transportasi dititikberatkan kepada penambahan kapasitas sarana dan prasarana transportasi, perbaikan pelayanan melalui pengembangan dan penerapan teknologi transportasi yang ramah lingkungan sesuai dengan isu perubahan iklim (*global warming*) sejalan dengan perkembangan permintaan dan preferensi masyarakat. Dalam peningkatan kapasitas dan pelayanan jasa transportasi senantiasa berpedoman kepada prinsip pembangunan berkelanjutan yang dituangkan dalam rencana induk, pedoman teknis dan skema pendanaan yang ditetapkan.

**Tujuan Kementerian Perhubungan adalah mewujudkan penyelenggaraan transportasi yang efektif dan efisien yang didukung SDM transportasi yang berkompeten guna mendukung perwujudan Indonesia yang lebih sejahtera, sejalan dengan perwujudan Indonesia yang aman dan damai serta adil dan demokratis.**

Penyelenggaraan kegiatan transportasi yang efektif berkaitan dengan ketersediaan aksesibilitas, optimalisasi kapasitas, maksimalisasi kualitas serta keterjangkauan dalam pelayanan, sedangkan penyelenggaraan transportasi yang efisien berkaitan dengan kemampuan pengembangan dan penerapan teknologi transportasi serta peningkatan kualitas SDM transportasi yang berdampak kepada maksimalisasi dayaguna dan minimasi biaya yang menjadi beban masyarakat.

**Sasaran pembangunan transportasi nasional Tahun 2010-2014 adalah:**

1. Meningkatnya keselamatan, keamanan, dan pelayanan sarana dan prasarana transportasi sesuai Standar Pelayanan Minimal;
2. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi guna mendorong pengembangan konektivitas antar wilayah;



3. Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana transportasi untuk mengurangi *backlog* dan *bottleneck* kapasitas infrastruktur transportasi;
4. Peningkatan kualitas SDM dan melanjutkan restrukturisasi kelembagaan dan reformasi regulasi;
5. Meningkatkan pengembangan teknologi transportasi yang efisien dan ramah lingkungan sebagai antisipasi terhadap perubahan iklim.

Di dalam mewujudkan visi dan menjalankan misi, serta mencapai tujuan dan sasaran seperti tersebut di atas, ditempuh melalui 2 (dua) strategi pokok pembangunan perhubungan:

### ***Strategi dan Penataan Penyelenggaraan Perhubungan***

Strategi ini diarahkan untuk penataan penyelenggaraan perhubungan dan dilanjutkan dengan penataan Sistem Transportasi Nasional sejalan dengan perubahan lingkungan strategis baik pada skala lokal, regional maupun global.

### ***Strategi Pembangunan Perhubungan***

Strategi Pembangunan Perhubungan diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan termasuk keselamatan dan keamanan dalam kerangka penyediaan aksesibilitas jasa perhubungan kepada masyarakat baik di seluruh pelosok tanah air maupun di manca negara.

### **Kebijakan Umum Kementerian Perhubungan dalam pembangunan dan penyelenggaraan transportasi (2010-2014)**

1. Mendukung pergerakan kelancaran mobilitas penumpang dan distribusi barang/ jasa untuk mendorong pengembangan konektivitas antar wilayah dan meningkatkan daya saing produk nasional;
2. Mewujudkan ketahanan nasional dan wawasan nusantara guna memantapkan penalaran keutuhan NKRI;
3. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi guna memberikan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa transportasi;



4. Memberikan ruang seluas-luasnya kepada daerah berdasarkan kewenangannya dan memberikan kemudahan kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan angkutan massal;
5. Mendorong partisipasi peran serta swasta dengan memperhitungkan tingkat pelayanan agar tetap terjaga efisiensi, pemerataan kepentingan daya beli masyarakat lainnya serta kepentingan operator terkait dengan jaminan kelangsungan usaha;
6. Meningkatkan kualitas SDM Transportasi guna mewujudkan penyelenggaraan transportasi yang handal, efisien dan efektif;
7. Mendorong pengembangan teknologi transportasi yang ramah lingkungan sebagai antisipasi terhadap dampak perubahan iklim.

#### **2.1.2 RENSTRA DITJEN HUBLA TAHUN 2010 - 2014**

Dalam sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan strategik merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategik lokal, nasional dan global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategik yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya. Berbagai upaya sedang dan akan terus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, agar fungsi pengawasan dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab, serta dapat menegakkan supremasi hukum yang konsisten dan meningkatkan kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Peran Aparatur Pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP) bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi dan atau kewenangan pejabat/ unit kerja aparatur pemerintah baik pusat maupun daerah. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan antara lain melakukan pengembangan sistem informasi pengawasan secara transparan dan akuntabel terdiri dari ketersediaan informasi sistem pengawasan yang dipadukan dengan kebijakan perencanaan, pemantauan, pengendalian dan pelaporan. Selain itu juga dilakukan pendayagunaan sistem pengawasan baik pengawasan fungsional maupun pengawasan melekat sehingga dapat memberikan kontribusi bagi terselenggaranya



manajemen pemerintahan yang baik, terwujudnya akuntabilitas publik pemerintah dan terciptanya pemerintah yang baik, serta terwujudnya sinergi pengawasan di lingkungan Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

#### **I.6.1 Visi Ditjen Hubla Tahun 2010 – 2014**

Visi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, adalah:

---

terwujudnya penyelenggaraan transportasi laut nasional yang efektif, efisien dan berdaya saing serta memberikan nilai tambah sebagai infrastruktur dan tulang punggung kehidupan berbangsa dan bernegara.

---

#### **I.6.2 Misi Ditjen Hubla Tahun 2010 – 2014**

Untuk mewujudkan visi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tersebut, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran telah menetapkan misi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menjadi 5 (lima) misi utama pembangunan yang harus ditempuh sebagai berikut:

- 
1. Menyelenggarakan kegiatan angkutan di perairan dalam rangka memperlancar arus perpindahan orang/dan atau barang melalui perairan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan berdaya guna;
  2. Menyelenggarakan kegiatan kepelabuhanan yang andal dan berkemampuan tinggi, menjamin efisiensi dan mempunyai daya saing global untuk menunjang pembangunan nasional dan daerah yang berwawasan nusantara;
  3. Menyelenggarakan keselamatan dan kemandirian angkutan perairan dan pelabuhan;
  4. Menyelenggarakan perlindungan lingkungan maritim di perairan nusantara;
  5. Melaksanakan konsolidasi peran masyarakat, dunia usaha dan pemerintah melalui restrukturisasi dan reformasi peraturan;



### I.6.3 Tujuan Ditjen Hubla

Tujuan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut adalah sebagai berikut:

1. Mempertahankan pelayanan jasa sarana dan prasarana sub sektor perhubungan laut yang mampu memenuhi kebutuhan minimum dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi.
2. Mereposisi peran pemerintah dalam rangka pelaksanaan daerah, menciptakan iklim kompetisi yang sehat dan meningkatkan penegakan hukum.
3. Meningkatkan kualitas dan produktivitas pelayanan sub sektor perhubungan laut yang aman, nyaman, tepat waktu, terjangkau berdaya saing serta memberikan nilai tambah.
4. Meningkatkan kapasitas aparatur negara dan SDM sub sektor perhubungan laut yang professional, mandiri, bertanggungjawab dan bebas KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme);
5. Memperluas jangkauan jaringan pelayanan sub sektor perhubungan laut sampai ke daerah terpencil dan terisolasi dan daerah perbatasan negara.

### Usulan Revisi Tujuan Ditjen Hubla

Dalam rangka Revisi RENSTRA Kementerian Perhubungan Tahun 2010 – 2014, Ditjen Hubla telah menyampaikan usulan Revisi Tujuan Ditjen Hubla sebagai berikut:

Tujuan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan produktivitas pelayanan sub sektor perhubungan laut yang aman, nyaman, tepat waktu, terjangkau berdaya saing serta memberikan nilai tambah.
2. Memperluas jangkauan jaringan pelayanan sub sektor perhubungan laut sampai ke daerah terpencil dan terisolasi dan daerah perbatasan negara.
3. Meningkatkan pelayanan jasa sarana dan prasarana sub sektor perhubungan laut yang mampu memenuhi kebutuhan minimum dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi.
4. Meningkatkan kapasitas aparatur negara dan SDM perhubungan laut yang professional, mandiri, bertanggungjawab dan bebas KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) serta menciptakan iklim kompetisi yang sehat dan penegakan hukum;
5. Memenuhi perlindungan lingkungan maritim dengan upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran



#### **I.6.4 Sasaran**

Sasaran pembangunan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2010 – 2014 yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan keselamatan pelayaran dan keamanan transportasi laut melalui peningkatan kapasitas sarana dan prasarana;
2. Meningkatnya pelayanan angkutan laut nasional melalui peningkatan kapasitas sarana dan prasarana;
3. Meningkatnya pelayanan kepelabuhanan nasional melalui peningkatan kapasitas sarana dan prasarana;
4. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia serta ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang transportasi laut;
5. Meningkatnya pemeliharaan dan kualitas lingkungan hidup serta penghematan penggunaan energi di bidang transportasi laut;
6. Meningkatnya kualitas administrasi negara di sektor transportasi laut.

#### **Usulan Revisi Sasaran Ditjen Hubla**

Dalam rangka Revisi RENSTRA Kementerian Perhubungan Tahun 2010 – 2014, Ditjen Hubla telah menyampaikan usulan Revisi Sasaran Ditjen Hubla sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan keselamatan pelayaran dan keamanan transportasi laut;
2. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi laut
3. Meningkatnya pelayanan kepelabuhanan nasional melalui peningkatan kapasitas pelabuhan;
4. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia serta administrasi negara di sektor transportasi laut;
5. Meningkatnya pelayanan dalam rangka perlindungan lingkungan maritim dibidang transportasi laut



## I.6.5 Strategi

Untuk mengimplementasikan sasaran pembangunan transportasi laut diwujudkan dengan menetapkan kebijakan dan strategi pembangunan transportasi laut sebagai berikut:

### 1. Strategi Nasional Bidang Keselamatan Pelayaran

#### a) Meningkatnya Pelayanan Keselamatan Pelayaran dan Keamanan Transportasi Laut

- 1) Perawatan Sarana dan Prasarana Keselamatan Pelayaran
- 2) Optimalisasi Penggunaan Fasilitas yang ada
- 3) Pengembangan Kapasitas
- 4) Peningkatan Keselamatan Transportasi Laut
- 5) Peningkatan Keamanan Transportasi Laut

### 2. Strategi Nasional Bidang Angkutan Laut

#### a) Meningkatnya Pelayanan Transportasi Laut Nasional

- 1) Peningkatan Kualitas Pelayanan
- 2) Peningkatan Peranan Transportasi Laut terhadap Pengembangan dan Peningkatan Daya Saing Sektor Lain.
- 1) Peningkatan dan Pengembangan Sektor Transportasi sebagai Urat Nadi Penyelenggaraan Sistem Logistik Nasional
- 2) Penyeimbangan Peranan BUMN, BUMD, Swasta dan Koperasi
- 3) Optimalisasi Penggunaan Fasilitas yang Ada
- 4) Pengembangan Kapasitas Transportasi Laut
- 5) Peningkatan Pelayanan pada Daerah Tertinggal
- 6) Peningkatan Pelayanan untuk Kelompok Masyarakat Tertentu
- 7) Peningkatan Pelayanan pada Keadaan Darurat

#### b). Meningkatnya Pembinaan Pengusahaan Transportasi Laut

- 1). Peningkatan Efisiensi dan Daya saing
- 2). Penyederhanaan Perijinan dan Deregulasi
- 3). Peningkatan Standarisasi Pelayanan dan Teknologi
- 4). Peningkatan Penerimaan dan Pengurangan Subsidi
- 5). Peningkatan Aksesibilitas Perusahaan Nasional Transportasi ke Luar Negeri
- 6). Peningkatan Produktivitas dan Efisiensi Perusahaan Jasa Transportasi Laut.
- 7). Pembinaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)



c). **Meningkatnya Penghematan Penggunaan Energi di Bidang Transportasi Laut.**

- 1) Mengkoordinasikan kebijakan program sektor energi dengan sektor transportasi laut.
- 2) Mengembangkan secara terus menerus sarana transportasi laut yang lebih hemat bahan bakar

**3. Strategi Nasional Bidang Kepelabuhanan**

a). **Meningkatnya Pelayanan Kepelabuhanan Nasional**

- 1) Peningkatan Kualitas Pelayanan
- 2) Penyeimbangan Peranan BUMN, BUMD, Swasta dan Koperasi
- 3) Perawatan Prasarana Transportasi Laut
- 4) Optimalisasi Penggunaan Fasilitas yang ada
- 5) Keterpaduan Antarmoda
- 6) Pengembangan Kapasitas Pelabuhan
- 7) Peningkatan Pelayanan pada Daerah Tertinggal
- 8) Peningkatan Pelayanan untuk Kelompok Masyarakat Tertentu
- 9) Peningkatan Pelayanan pada Keadaan Darurat

b). **Meningkatnya Pembinaan Pengusahaan Pelabuhan**

- 1) Peningkatan Efisiensi dan Daya Saing
- 2) Penyederhanaan Perijinan dan Deregulasi
- 3) Peningkatan Standarisasi Pelayanan dan Teknologi
- 4) Pembinaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

**4. Strategi Nasional Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia**

a) **Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Transportasi Laut melalui Tatranas, Tatrawai dan Tatrалok.**

- 1) Memperjelas dan mengharmonisasikan peran masing-masing instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah yang terlibat bidang pengaturan, administrasi dan penegakan hukum, berdasarkan azas dekonsentrasi dan desentralisasi.
- 2) Menentukan bentuk koordinasi dan konsultasi termasuk mekanisme hubungan kerja antar instansi pemerintah baik di pusat maupun daerah antara penyelenggara dan pemakai jasa transportasi laut.
- 3) Meningkatkan keterpaduan perencanaan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam berbagai aspek.



- b) **Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia, serta Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Bidang Transportasi Laut**
  - 1) Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut
  - 2) Peningkatan Kepedulian Masyarakat Terhadap Peraturan Perundangan Transportasi Laut.
- c) **Meningkatnya Penyediaan Dana Pembangunan Transportasi Laut**
  - 1) Peningkatan Penerimaan dari Pemakai Jasa Transportasi Laut
  - 2) Peningkatan Anggaran Pembangunan Nasional dan Daerah
  - 3) Peningkatan Partisipasi Swasta dan Koperasi
  - 4) Pemanfaatan Hibah/Bantuan Luar Negeri untuk Program-Program Tertentu
- d) **Meningkatnya Kualitas Administrasi Negara di Sektor Transportasi Laut**
  - 1) Penerapan Manajemen Modern
  - 2) Pengembangan Data dan Perencanaan Transportasi
  - 3) Peningkatan Struktur Organisasi
  - 4) Peningkatan Sumber Daya Manusia
  - 5) Peningkatan Sistem Pemotivasian
  - 6) Peningkatan Sistem Pengawasan

#### 5. Strategi Nasional Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia

- a) **Meningkatnya Pemeliharaan dan Kualitas Lingkungan Hidup serta Penghematan Penggunaan Energi di Bidang Transportasi Laut.**
  - 1) Peningkatan Proteksi Kualitas Lingkungan
  - 2) Peningkatan Kesadaran Terhadap Ancaman Tumpahan Minyak

### I.6.6 Arah Kebijakan

Untuk mengimplementasikan sasaran pembangunan transportasi laut diwujudkan dengan menetapkan arah kebijakan transportasi laut sebagai berikut:

1. **Memperlancar perpindahan orang dan/atau barang dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman, dan berdaya guna, dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat;**
2. **Meningkatkan penyelenggaraan kegiatan angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim;**



3. Mengembangkan kemampuan armada angkutan nasional yang tangguh serta didukung industri perkapalan yang andal;
4. Mengembangkan usaha jasa angkutan di perairan nasional yang andal dan berdaya saing;
5. Meningkatkan kemampuan dan peranan kepelabuhanan serta keselamatan dan keamanan pelayaran;
6. Mewujudkan sumber daya manusia yang berjiwa bahari, profesional, dan mampu mengikuti perkembangan kebutuhan penyelenggaraan pelayaran dan ;
7. Memenuhi perlindungan lingkungan maritim dengan upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran.

### **I.6.7 Prioritas Pembangunan Ditjen Hubla**

Adapun kriteria prioritas pembangunan perhubungan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut adalah sebagai berikut:

1. **Pembangunan Berkesinambungan;**
  - a) Penyediaan dana pendamping (local cost) bagi kegiatan yang dibiayai dengan Pinjaman/Hibah Luar negeri;
  - b) Kegiatan lanjutan/penyelesaian pembangunan infrastruktur dan sarana transportasi laut;
  - c) Pemeliharaan dan pengoperasian fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran
2. **Program Prioritas;**
  - a) Pembangunan fasilitas keselamatan dan keamanan transportasi laut untuk mendukung *Roadmap to Zero Accident*;
  - b) Rehabilitasi prasarana dan sarana transportasi laut
  - c) Pelayanan keperintisan dalam bentuk subsidi operasi serta penyediaan prasarana dan sarana transportasi laut
  - d) Penataan kelembagaan dan peningkatan kualitas SDM, peraturan perundangan, penyempurnaan sarana bantu kerja dan mekanisme pengawasan sesuai UU no. 17/2008



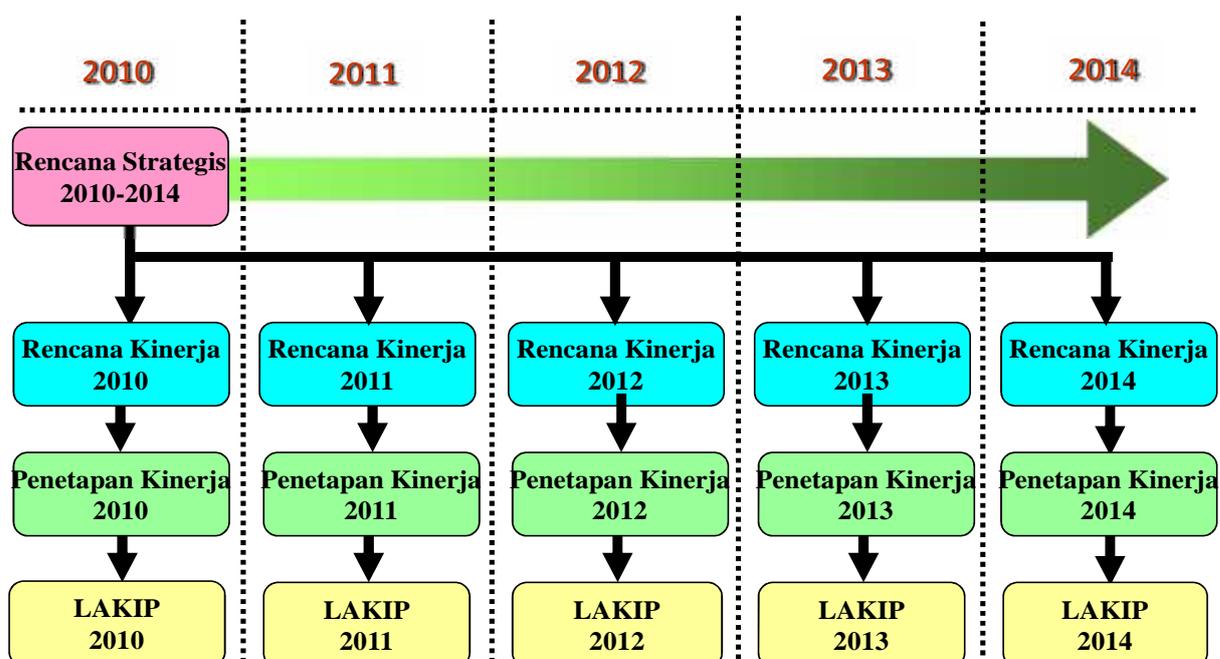
### 3. Politik dan Pemerataan Pembangunan

- a) Pembangunan daerah tertinggal;
- b) Pembangunan kawasan perbatasan dan pulau-pulau terluar
- c) Pembangunan daerah pasca konflik dan bencana

#### 2.2 Perencanaan Kinerja Ditjen Hubla Tahun 2011

Proses penjabaran dari Sasaran dan Program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2010 – 2014, yang akan dilaksanakan oleh Ditjen Hubla melalui berbagai kegiatan secara tahunan termasuk didalamnya adalah perencanaan kinerja 2011 yang merupakan proses perencanaan kinerja yang didokumentasikan dalam Rencana Kinerja Tahunan (*Annual Performance Plan*). Di dalam Rencana Kinerja Tahunan ditetapkan target kinerja tahun 2011 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja ini akan menjadi komitmen bagi Ditjen Hubla untuk mencapainya dalam tahun 2011. Hubungan antara rencana kinerja tahunan, penetapan kinerja, dan LAKIP dapat dilihat pada gambar 2.1 di bawah ini:

**Gambar 2.1**  
**Dokumen yang Digunakan dalam Sistem AKIP**



Dengan demikian, Rencana Kinerja 2011 Ditjen Hubla merupakan dokumen yang menyajikan target kinerja untuk tahun 2011 sedangkan Penetapan Kinerja Ditjen Hubla Tahun 2011 merupakan bentuk komitmen penuh Ditjen Hubla untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya sebagai bagian dari upaya memenuhi misi Ditjen Hubla.

### 2.2.1 Indikator Kinerja Utama sesuai PM 85 Tahun 2010

Untuk mengukur sejauh mana Ditjen Hubla telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan, perlu dirumuskan indikator kinerja dan target kinerja yang harus dicapai sampai pada akhir tahun 2014. Indikator Kinerja masing-masing Target Indikator Kinerja Utama yang ingin dicapai tahun 2011 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Rencana Kinerja Tahun 2011 (Sesuai Indikator Kinerja Utama PM 85 Tahun 2010)**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2011
1	Meningkatkan pelayanan keselamatan pelayaran dan keamanan transportasi laut melalui peningkatan kapasitas sarana dan prasarana	Tingkat kecukupan dan keandalan sarana dan prasarana, pengaturan dan sistem prosedur, melalui a. Pemb. baru / lanjutan Mensu/Ramsu/Ramtun b. Replace/ Rehab Mensu/Ramsu/Ramtun c. Pembangunan Gedung SROP d. Pembangunan dermaga kenavigasian e. Docking/Rehab Kapal f. Pembangunan/ lanjutan kapal patroli g. Lokasi Pengerukan	12 Unit 44 Unit 6 Lokasi 8 Lokasi 11 Unit 38 Unit 22 Lokasi
2	Meningkatkan Pelayanan Angkutan Laut Nasional melalui peningkatan kapasitas sarana dan prasarana	a. Prosentase peningkatan pangsa muatan kapal nasional untuk angkutan laut dalam negeri dan luar negeri b. Prosentase peningkatan produktivitas angkutan laut nasional c. Prosentase peningkatan kinerja angkutan laut perintis - Jumlah Trayek - Jlh pemb baru/Lanjutan Kapal Perintis	65Trayek 8 Kapal



<b>NO</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET TAHUN 2011</b>
3	Meningkatnya Pelayanan Kepelabuhanan Nasional melalui peningkatan kapasitas sarana dan prasarana	Penurunan turn-around time rata-rata kapal di Pelabuhan Utama dan Pengumpul, melalui a. Pemb. Pelab. Baru b. Pemb. Pelab. Lanjutan c. Rehab/Replace Pelab d. Penyelesaian Pemb. Pelabuhan	89 Lokasi 158 Lokasi 5 Lokasi 7 Lokasi
4	Meningkatnya Kualitas Administrasi Negara di Sektor Transportasi Laut	Tingkat Pencapaian Penetapan Peraturan a. Jumlah Laporan Kajian b. Jumlah Laporan monitoring	48 Laporan 8 Laporan
5	Meningkatnya Kualitas SDM serta ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang transportasi laut	Prosentase pemenuhan terhadap kebutuhan dan peningkatan kompetensi pejabat pemeriksa keselamatan kapal (marine inspector) a. Jumlah SDM yang memiliki sertifikat/diklat teknis b. Jumlah Aplikasi	5 Aplikasi
6	Meningkatnya Pemeliharaan dan Kualitas Lingkungan Hidup serta Penghematan Penggunaan Energi di bidang transportasi laut	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan dalam rangka perlindungan lingkungan maritim melalui studi/kajian, evaluasi dan pengadaan sarana/ prasarana a. Jumlah jenis pengadaan peralatan	3 Jenis Peralatan

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menetapkan 6 (enam) sasaran yang memiliki target-target capaian kinerjanya, baik dalam rentang lima tahun (2010 - 2014) maupun yang bersifat tahunan. Untuk mencapai target-target yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis Ditjen Hubla tahun 2010 – 2014, maka telah disusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang berisi serangkaian target yang hendak dicapai dan program pendukung.

Dalam mencapai target indikator kinerja yang ditetapkan, Ditjen Hubla melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2011. Adapun kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan adalah kegiatan-kegiatan strategis yang dilaksanakan pada UPT di lingkungan Ditjen Hubla dan kegiatan yang ada pada Kantor Pusat Ditjen Hubla. Dalam rangka mendukung tujuan dan sasaran yang akan dicapai, berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2011 akan diuraikan pada tabel 2.2 berikut ini:



**Tabel 2.2 Rencana Kinerja Tahunan Ditjen Hubla Tahun 2011**

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
		OUTPUT	INPUT
<b>S A S A R A N 1</b>			
<b>Meningkatkan pelayanan keselamatan pelayaran dan keamanan transportasi laut melalui peningkatan kapasitas sarana dan prasarana</b>			
1.1	Replace ramsu/mensu/ramtun	89 Paket	115.082.949
1.2	Pembangunan ramsu/mensu/ramtun	19 Paket	22.905.569
1.3	Pembangunan/Rehab gedung SROP	12 Paket	14.516.831
1.4	Replace/Rehab Dermaga	2 Lokasi	15.239.458
1.5	Pembangunan/lanjutan dermaga	10 Paket	80.456.599
1.6	Pembangunan/Replace Bengkel Kenavigasian	3 Lokasi	9.744.107
1.7	Docking/Rehab Kapal Patroli/Kenavigasian	25 Unit	46.146.756
1.8	Pembangunan/lanjutan Kapal Patroli/Marine	48 Unit	286.353.200
	Kelas I	4 Unit	218.000.000
	Kelas IV	6 Unit	13.200.000
	Kelas V	32 Unit	28.800.000
	Kapal Marine/Perambuan	6 Unit	26.353.200
1.9	Volume Pengerukan	7.760.182 m3 18 Paket 33 Lokasi	495.579.839
1.10	Pembangunan Gudang Logistik	1 Paket	1.633.000
1.11	Pembangunan taman pelampung, Disnav Palembang	1.500 m2	621.237
1.12	Rehab SROP Bengkulu	2 Paket	1.924.560
1.13	Pembuatan Talud lokasi Mensu Mamburit pada Disnav Surabaya	1 Paket	2.449.462
1.14	Lanjutan pembangunan fasilitas penunjang Mensu, Disnav Benoa	1 Paket	1.700.862
1.15	Perkuatan Breakwater type I (sisi selatan) dan Pembangunan Breakwater type II (sisi utara), Disnav Tarakan	1 Paket	48.286.510
1.16	Pengadaan Radio SSB untuk Menara Suar	1 Paket	450.000



NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
		OUTPUT	INPUT
1.17	Pengadaan Peralatan Radio SSB (Single Side Band)	100 Buah	7.500.000
<b>TOTAL SASARAN 1</b>			<b>1.323.257.841</b>
<b>SASARAN 2</b>			
<b>Meningkatkan Pelayanan Angkutan Laut Nasional melalui peningkatan kapasitas sarana dan prasarana</b>			
2.1	Subsidi Angkutan Laut Perintis	63 Trayek	294.264.221
2.2	Pembangunan / Lanjutan Kapal Perintis	8 Kapal	153.200.00
<b>TOTAL SASARAN 2</b>			<b>447.464.221</b>
<b>SASARAN 3</b>			
<b>Meningkatnya Pelayanan Kepelabuhanan Nasional melalui peningkatan kapasitas sarana dan prasarana</b>			
3.1	Pembangunan Pelabuhan Baru	89 Pelabuhan	1.355.677.270
3.2	Pembangunan Pelabuhan Lanjutan	158 Pelabuhan	3.022.197.668
3.3	Rehab/Replace Pelabuhan	5 Pelabuhan	51.536.669
3.4	Penyelesaian Pembangunan Pelab.	7 Pelabuhan	60.246.628
<b>TOTAL SASARAN 3</b>			<b>4.489.658.235</b>
<b>SASARAN 4</b>			
<b>Meningkatnya Kualitas Administrasi Negara di Sektor Transportasi Laut</b>			
4.1	Jumlah Studi/Kajian	56 Laporan	36.615.363
4.2	Jumlah Pengawasan/Monitoring	11 Laporan	15.071.968
<b>TOTAL SASARAN 4</b>			<b>51.237.331</b>
<b>SASARAN 5</b>			
<b>Meningkatnya Kualitas SDM serta ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang transportasi laut</b>			
5.1	Jumlah Aplikasi	11 Aplikasi	154.541.245



NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
		OUTPUT	INPUT
<b>TOTAL SASARAN 5</b>			<b>154.541.245</b>
<b>SASARAN 6</b>			
<b>Meningkatnya Pemeliharaan dan Kualitas Lingkungan Hidup serta Penghematan Penggunaan Energi di bidang transportasi laut</b>			
6.1	Jumlah Studi/Kajian	1 Laporan	325.000
6.2	Jumlah Jenis Pengadaan Peralatan	7 Laporan	30.300.000

### 2.2.2 Revisi Indikator Kinerja Utama ( PM 85 Tahun 2010 )

Dalam rangka penyempurnaan Indikator Kinerja utama yang terdapat pada PM. 85 Tahun 2010, maka Ditjen Hubla telah melakukan Revisi Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:



**Tabel 2.3 Revisi Indikator Kinerja Utama Ditjen Hubla**

<b>NO</b>	<b>REVISI SASARAN</b>	<b>REVISI IKU</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2011</b>
1.	Meningkatnya Keselamatan Pelayaran dan Keamanan Transportasi Laut	1.1 Jumlah kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh manusia	Kejadian kecelakaan	41
		1.2 Jumlah kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh alam	Kejadian kecelakaan	80
		1.3 Jumlah kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh teknis dan lain-lain	Kejadian kecelakaan	23
		1.4 Jumlah kejadian jenis percobaan perompakan dan pencurian pada transportasi laut	Kejadian	6
2.	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi laut.	2.1. Jumlah rute perintis yang dilayani transportasi laut	Rute	61
		2.2. Jumlah voyage perintis yang dilayani transportasi laut	Voyage	1.420
		2.3. Jumlah Kota/daerah yang terhubung oleh transportasi laut	Kab/Kota	248
		2.4. Jumlah wilayah terpencil, terluar, daerah perbatasan dan daerah belum berkembang yang dilayani angkutan laut perintis	Lokasi	12
3.	Meningkatnya pelayanan kepelabuhan nasional melalui peningkatan kapasitas pelabuhan	3.1 Jumlah penumpang transportasi laut yang terangkut	Orang	5.657.505
		3.2 Jumlah penumpang Angkutan Laut Perintis	Orang	225.033
		3.3 Jumlah muatan angkutan laut dalam negeri yang diangkut oleh kapal nasional	Ton	316.489.377
		3.4 Jumlah muatan angkutan laut dalam negeri yang diangkut oleh kapal asing	Ton	3.779.169
		3.5 Prosentase pangsa muatan kapal nasional untuk angkutan laut dalam negeri	%	98,82

NO	REVISI SASARAN	REVISI IKU	SATUAN	TARGET 2011
		3.6 Prosentase pangsa muatan kapal nasional untuk angkutan laut luar negeri	%	9,50
		3.7 Prosentase peningkatan produktivitas angkutan laut nasional	%	3,65
		3.8 Jumlah pelabuhan yang mempunyai pencapaian Waiting Time (WT) masih sesuai standar yang telah ditetapkan	Pelabuhan	24
		3.9 Jumlah pelabuhan yang mempunyai pencapaian Approach Time (AT) masih sesuai standar yang telah ditetapkan	Pelabuhan	24
		3.10 Jumlah pelabuhan yang mempunyai pencapaian Waktu Efektif (Effective Time/ET) masih sesuai standar yang telah ditetapkan	Pelabuhan	24
		3.11 Jumlah kebutuhan pelabuhan yang tidak diusahakan pada wilayah terpencil, terluar, daerah perbatasan <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jumlah Pembangunan pelabuhan baru dalam rangka membuka outlet yang belum terlayani</li> <li>b. Jumlah Lanjutan Pembangunan Pelabuhan baru dalam rangka menuju keterbukaan outlet</li> <li>c. Jumlah Pengembangan, rehabilitasi dan replace Fasilitas Pelabuhan dalam rangka pemulihan dan peningkatan Kapasitas Pelabuhan</li> </ul>	Pelabuhan  Pelabuhan  Pelabuhan	65  149  23

<b>NO</b>	<b>REVISI SASARAN</b>	<b>REVISI IKU</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2011</b>
		d. Jumlah Penyelesaian Pelabuhan baru dalam rangka mengembangkan potensi ekonomi wilayah	Pelabuhan	25
4.	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia serta Administrasi Negara di sektor Transportasi Laut.	4.1. Jumlah kebutuhan tenaga <i>marine inspector A</i> 4.2. Jumlah kebutuhan tenaga <i>marine inspector B</i> 4.3. Jumlah kebutuhan Tenaga PPNS 4.4. Jumlah kebutuhan tenaga Kesyahbandaran Kelas A 4.5. Jumlah kebutuhan tenaga Kesyahbandaran Kelas B 4.6. Jumlah penyelesaian regulasi	Orang Orang Orang Orang Orang RPM Keputusan Dirjen	60 120 50 60 120 5 1
5.	Meningkatnya pelayanan dalam rangka perlindungan lingkungan maritim dibidang transportasi laut	5.1. Jumlah Penurunan emisi gas buang (CO2) transportasi laut 5.2. Jumlah kebutuhan tenaga penanggulangan pencemaran 5.3. Jumlah kebutuhan tenaga penanggulangan kebakaran 5.4. Jumlah kebutuhan tenaga penyelam 5.5. Jumlah kebutuhan pemilikan sertifikat IOPP (International Oil pollution Prevention) 5.6. Jumlah kebutuhan pemilikan SNPP (Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran) 5.7. Peningkatan pemahaman aparat UPT Ditjen Hubla terhadap pembangunan dan operasional pelabuhan yang berwawasan lingkungan	mega ton Orang Orang Orang Sertifikat Sertifikat UPT	1.340,44 1.764 1.232 1.232 981 1.389 5

### 2.2.3 Penyesuaian Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2011 (Sesuai Revisi Indikator Kinerja Utama Pada PM. 85 Tahun 2010)

Pada kurun waktu 2011, Kementerian Perhubungan telah melakukan revisi terhadap RENSTRA Kementerian khususnya mengenai Indikator Kinerja Utama (IKU), dimana pada kesempatan tersebut Ditjen Hubla juga telah menyampaikan usulan Revisi terhadap Indikator Kinerja Utama yang terdapat pada PM. 85 Tahun 2010 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Kementerian Perhubungan. Tabel berikut merupakan Penyesuaian Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Ditjen Hubla dengan adanya Revisi tersebut.

**Tabel 2.4 Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2011 (Sesuai Revisi Indikator Kinerja Utama PM 85 Tahun 2010)**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2011
1.	Meningkatnya Keselamatan Pelayaran dan Keamanan Transportasi Laut	1.1 Jumlah kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh manusia	41 Kejadian kecelakaan
		1.2 Jumlah kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh alam	80 Kejadian kecelakaan
		1.3 Jumlah kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh teknis dan lain-lain	23 Kejadian kecelakaan
		1.4 Jumlah kejadian jenis percobaan perompakan dan pencurian pada transportasi laut	6 Kejadian
2.	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi laut.	2.1. Jumlah rute perintis yang dilayani transportasi laut	61 Rute
		2.2. Jumlah voyage perintis yang dilayani transportasi laut	1.420 Voyage
		2.3. Jumlah Kota/daerah yang terhubung oleh transportasi laut	248 Kab/Kota
		2.4. Jumlah wilayah terpencil, terluar, daerah perbatasan dan daerah belum berkembang yang dilayani angkutan laut perintis	12 Lokasi



<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET 2011</b>
3.	Meningkatnya pelayanan kepelabuhan nasional melalui peningkatan kapasitas pelabuhan	3.1. Jumlah penumpang transportasi laut yang terangkut	5.657.505 Orang
		3.2. Jumlah penumpang Angkutan Laut Perintis	225.033 Orang
		3.3. Jumlah muatan angkutan laut dalam negeri yang diangkut oleh kapal nasional	316.489.377 Ton
		3.4. Jumlah muatan angkutan laut dalam negeri yang diangkut oleh kapal asing	3.779.169 Ton
		3.5. Prosentase pangsa muatan kapal nasional untuk angkutan laut dalam negeri	98,82 %
		3.6. Prosentase pangsa muatan kapal nasional untuk angkutan laut luar negeri	9,50 %
		3.7. Prosentase peningkatan produktivitas angkutan laut nasional	3,65 %
		3.8. Jumlah pelabuhan yang mempunyai pencapaian Waiting Time (WT) masih sesuai standar yang telah ditetapkan	24 Pelabuhan
		3.9. Jumlah pelabuhan yang mempunyai pencapaian Approach Time (AT) masih sesuai standar yang telah ditetapkan	24 Pelabuhan
		3.10. Jumlah pelabuhan yang mempunyai pencapaian Waktu Efektif (Effective Time/ET) masih sesuai standar yang telah ditetapkan	24 Pelabuhan



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2011
		<p>3.11. Jumlah kebutuhan pelabuhan yang tidak diusahakan pada wilayah terpencil, terluar, daerah perbatasan</p> <p>a. Jumlah Pembangunan pelabuhan baru dalam rangka membuka outlet yang belum terlayani</p> <p>b. Jumlah Lanjutan Pembangunan Pelabuhan baru dalam rangka menuju keterbukaan outlet</p> <p>c. Jumlah Pengembangan, rehabilitasi dan replace Fasilitas Pelabuhan dalam rangka pemulihan dan peningkatan Kapasitas Pelabuhan</p> <p>d. Jumlah Penyelesaian Pelabuhan baru dalam rangka mengembangkan potensi ekonomi wilayah</p>	<p>65 Pelabuhan</p> <p>149 Pelabuhan</p> <p>23 Pelabuhan</p> <p>25 Pelabuhan</p>
4.	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia serta Administrasi Negara di sektor Transportasi Laut.	<p>4.1. Jumlah kebutuhan tenaga <i>marine inspector A</i></p> <p>4.2. Jumlah kebutuhan tenaga <i>marine inspector B</i></p> <p>4.3. Jumlah kebutuhan Tenaga PPNS</p> <p>4.4. Jumlah kebutuhan tenaga Kesyahbandaran Kelas A</p> <p>4.5. Jumlah kebutuhan tenaga Kesyahbandaran Kelas B</p> <p>4.6. Jumlah penyelesaian regulasi</p>	<p>60 Orang</p> <p>120 Orang</p> <p>50 Orang</p> <p>60 Orang</p> <p>120 Orang</p> <p>5 RPM</p> <p>1 Keputusan Dirjen</p>



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2011
5.	Meningkatnya pelayanan dalam rangka perlindungan lingkungan maritim dibidang transportasi laut	5.1. Jumlah Penurunan emisi gas buang (CO2) transportasi laut	1.340,44 mega ton
		5.2. Jumlah kebutuhan tenaga penanggulangan pencemaran	1.764 Orang
		5.3. Jumlah kebutuhan tenaga penanggulangan kebakaran	1.232 Orang
		5.4. Jumlah kebutuhan tenaga penyelam	1.232 Orang
		5.5. Jumlah kebutuhan pemilikan sertifikat IOPP (International Oil pollution Prevention)	981 Sertifikat
		5.6. Jumlah kebutuhan pemilikan SNPP (Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran)	1.389 Sertifikat
		5.7. Peningkatan pemahaman aparat UPT Ditjen Hubla terhadap pembangunan dan operasional pelabuhan yang berwawasan lingkungan	5 UPT

### 2.3 Penetapan Kinerja Ditjen Hubla Tahun 2011

Dalam rangka mengoperasionalkan Rencana Pembangunan Sub Sektor Transportasi Laut setiap tahunnya Perencanaan Stratejik dituangkan dalam suatu Penetapan Kinerja Tahunan (*Performance Contract*). Rencana kerja tahunan merupakan penjabaran lebih lanjut dari perencanaan stratejik, yang didalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun mendatang dengan menunjukkan sejumlah indikator kinerja kunci (*key performance indicators*) yang relevan. Indikator dimaksud meliputi indikator-indikator pencapaian sasaran dan indikator kinerja kegiatan. Penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur yang digunakan dalam menilai keberhasilan/kegagalan penyelenggaraan pemerintahan untuk periode 1 (satu) tahun ke depan.

Untuk mewujudkan visi sebagaimana tercantum di dalam Rencana Pembangunan Sub Sektor Transportasi Laut telah dirumuskan tujuan dan sasaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tahun 2010-2014. Dengan mengacu kepada sasaran dan tujuan, tugas



pokok dan fungsi serta Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, maka setiap tahun dilaksanakan beberapa kegiatan pembangunan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Beberapa kegiatan yang strategis dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan tertuang di dalam Penetapan Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Secara lebih rinci, Penetapan Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun Anggaran 2011 (yang sudah ditandatangani antara Menteri Perhubungan dengan Direktur Jenderal Perhubungan Laut) dapat dilihat pada Tabel 2.2 yaitu Penetapan Kinerja Ditjen Hubla yang mengacu pada Indikator Kinerja Utama yang terdapat pada PM. 85 Tahun 2010 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Kementerian Perhubungan

### 2.3.1 Penetapan Kinerja Tahun 2011 Sesuai Indikator Kinerja Utama Pada PM. 85 Tahun 2010

**Tabel 2.5 Penetapan Kinerja Ditjen Hubla Tahun 2011  
( Sesuai Indikator Kinerja Utama Pada PM. 85 Tahun 2010 )**

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
		OUTPUT	INPUT
<b>S A S A R A N 1</b>			
<b>Meningkatkan pelayanan keselamatan pelayaran dan keamanan transportasi laut melalui peningkatan kapasitas sarana dan prasarana</b>			
1.1	Pemb. Baru / lanjutan Mensu/Ramsu/Ramtun	12 Unit	17.687.751.000
1.2	Replace/Rehab Mensu/Ramsu/Ramtun	44 Unit	46.240.191.000
1.3	Pembangunan Gedung SROP	6 Lokasi	7.087.597.000
1.4	Pembangunan dermaga kenavigasian	8 Lokasi	47.039.788
1.5	Docking/Rehab Kapal	11 Unit	27.705.523.000
1.6	Pembangunan/kapal patroli lanjutan	38 Unit	277.940.000.000
1.7	Pengerukan	22 Lokasi	293.140.525.000
<b>S A S A R A N 2</b>			
<b>Meningkatkan Pelayanan Angkutan Laut Nasional melalui peningkatan kapasitas sarana dan prasarana</b>			



NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
		OUTPUT	INPUT
2.1	Subsidi Operasional Angkutan Laut Perintis	61 Trayek	279.235.735.000
2.2	Jlh pemb baru/lanjutan kapal perintis	8 Kapal	147.686.520.000
<b>TOTAL SASARAN 2</b>			<b>426.922.255.000</b>
<b>SASARAN 3</b>			
<b>Meningkatnya Pelayanan Kepelabuhanan Nasional melalui peningkatan kapasitas sarana dan prasarana</b>			
3.1	Pemb. Pelab. Baru	65 Lokasi	712.820.168.000
3.2	Pemb. Pelab. Lanjutan	149 Paket	2.118.773.699.000
3.3	Rehab/Replace Pelab	23 Paket	219.808.821.000
3.4	Penyelesaian Pemb. Pelab.	25 Paket	236.091.898.000
<b>TOTAL SASARAN 3</b>			<b>3.287.494.586.000</b>
<b>SASARAN 4</b>			
<b>Meningkatnya Kualitas Administrasi Negara di Sektor Transportasi Laut</b>			
4.1	Jumlah Laporan Kajian	48 Laporan Kajian	31.362.390.000
4.2	Jumlah Laporan monitoring	8 Laporan Monitoring	10.421.969.000
<b>TOTAL SASARAN 4</b>			<b>41.784.359.000</b>
<b>SASARAN 5</b>			
<b>Meningkatnya Kualitas SDM serta ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang transportasi laut</b>			
5.1	Jumlah Aplikasi	5 Aplikasi	16.421.794.000
<b>TOTAL SASARAN 5</b>			<b>25.757.575.000</b>
<b>SASARAN 6</b>			



NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
		OUTPUT	INPUT
<b>Meningkatnya Pemeliharaan dan Kualitas Lingkungan Hidup serta Penghematan Penggunaan Energi di bidang transportasi laut</b>			
6.1	Pengadaan peralatan	4 Jenis Peralatan	17.300.000
6.2	Survey studi teknis penyingkiran gangguan bawah air, Adpel Pulang Pisau	1 Laporan	325.000
6.3	Kegiatan Pengadaan Oil Boom 200 Meter	1 Set	11.000.000
6.4	Pengadaan Kendaraan Roda 6 Khusus SAR beserta peralatannya, Disnav Sorong	1 Paket	2.000.000

### 2.3.2 Penyesuaian Penetapan Kinerja Tahun 2011 Sesuai Revisi Indikator Kinerja Utama Pada PM. 85 Tahun 2010

**Tabel 2.6**

#### Penyesuaian Penetapan Kinerja Ditjen Hubla Tahun 2011 Sesuai Revisi Indikator Kinerja Utama Pada PM. 85 Tahun 2010

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
<b>S A S A R A N 1</b>			
<b>Meningkatkan Keselamatan Pelayaran dan Keamanan Transportasi Laut</b>			
1.1	Jumlah kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh manucia	Kejadian keelakaan	41
1.2	Jumlah kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh alam	Kejadian kecelakaan	80
1.3	Jumlah kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh teknis dan lain-lain	Kejadian kecelakaan	23
1.4	Jumlah kejadian jenis percobaan perompakan dan pencurian pada transportasi laut	Kejadian	6
<b>S A S A R A N 2</b>			
<b>Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat terhadap Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi Laut</b>			



2.1	Jumlah rute perintis yang dilayani transportasi laut	Rute	61
2.2	Jumlah voyage perintis yang dilayani transportasi laut	Voyage	1.420
2.3	Jumlah Kota/daerah yang terhubung oleh transportasi laut	Kab/Kota	248
2.4	Jumlah wilayah terpencil, terluar, daerah perbatasan dan daerah belum berkembang yang dilayani angkutan laut perintis	Lokasi	12
<b>S A S A R A N 3</b>			
<b>Meningkatnya Pelayanan Kepelabuhanan Nasional melalui Peningkatan Kapasitas Pelabuhan</b>			
3.1	Jumlah penumpang transportasi laut yang terangkut	Orang	5.657.505
3.2	Jumlah penumpang Angkutan Laut Perintis	Orang	225.033
3.3	Jumlah muatan angkutan laut dalam negeri yang diangkut oleh kapal nasional	Ton	316.489.377
3.4	Jumlah muatan angkutan laut dalam negeri yang diangkut oleh kapal asing	Ton	3.779.169
3.5	Prosentase pangsa muatan kapal nasional untuk angkutan laut dalam negeri	%	98,82
3.6	Prosentase pangsa muatan kapal nasional untuk angkutan laut luar negeri	%	9,50
3.7	Prosentase peningkatan produktivitas angkutan laut nasional	%	3,65
3.8	Jumlah pelabuhan yang mempunyai pencapaian Waiting Time (WT) masih sesuai standar yang telah ditetapkan	Pelabuhan	24
3.9	Jumlah pelabuhan yang mempunyai pencapaian Approach Time (AT) masih sesuai standar yang telah ditetapkan	Pelabuhan	24



3.10	Jumlah pelabuhan yang mempunyai pencapaian Waktu Efektif (Effective Time/ET) masih sesuai standar yang telah ditetapkan	Pelabuhan	24
3.11	Jumlah kebutuhan pelabuhan yang tidak diusahakan pada wilayah terpencil, terluar, daerah perbatasan		
	a. Jumlah Pembangunan pelabuhan baru dalam rangka membuka outlet yang belum terlayani	Pelabuhan	65
	b. Jumlah Lanjutan Pembangunan Pelabuhan baru dalam rangka menuju keterbukaan outlet	Pelabuhan	149
	c. Jumlah Pengembangan, rehabilitasi dan replace Fasilitas Pelabuhan dalam rangka pemulihan dan peningkatan Kapasitas Pelabuhan	Pelabuhan	23
	d. Jumlah Penyelesaian Pelabuhan baru dalam rangka mengembangkan potensi ekonomi wilayah	Pelabuhan	25
<b>S A S A R A N 4</b>			
<b>Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia serta Administrasi Negara di sektor Transportasi Laut</b>			
4.1	Jumlah kebutuhan tenaga <i>Marine Inspector A</i>	Orang	30
4.2	Jumlah kebutuhan tenaga <i>Marine Inspector B</i>	Orang	30
4.3	Jumlah Kebutuhan Tenaga PPNS	Orang	50
4.4	Jumlah kebutuhan tenaga Kesyahbandaran Kelas A	Orang	60
4.5	Jumlah kebutuhan tenaga Kesyahbandaran Kelas B	Orang	120
4.6	Jumlah penyelesaian regulasi	RPM Kep. Dirjen	5 1



<b>S A S A R A N 5</b>			
<b>Meningkatnya Pemeliharaan dan Kualitas Lingkungan Hidup serta Penghematan Penggunaan Energi di bidang transportasi laut</b>			
5.1	Jumlah Penurunan emisi gas buang (CO2) transportasi laut	mega ton	1.340,44
5.2	Jumlah kebutuhan tenaga penanggulangan pencemaran	Orang	1.764
5.3	Jumlah kebutuhan tenaga penanggulangan kebakaran	Orang	1.232
5.4	Jumlah kebutuhan tenaga penyelam	Orang	1.232
5.5	Jumlah kebutuhan pemilikan sertifikat IOPP (International Oil polution Prevention)	Sertifikat	981
5.6	Jumlah kebutuhan pemilikan SNPP (Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran)	Sertifikat	1.389
5.7	Peningkatan pemahaman aparat UPT Ditjen Hubla terhadap pembangunan dan operasional pelabuhan yang berwawasan lingkungan	UPT	5

Dalam bab Akuntabilitas Kinerja, indikator kinerja yang akan diakuntabilitaskan realisasinya adalah indikator kinerja menurut dokumen Penetapan Kinerja dan indikator kinerja utama setelah adanya revisi terhadap Indikator Kinerja Utama Ditjen Hubla yang terdapat pada PM. 85 tahun 2010 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

## **2.4 Penyesuaian Rencana Kinerja Ditjen Hubla Tahun 2011 Terkait APBN-P dan Penghematan**

### **2.4.1 APBN Ditjen Hubla Tahun 2011**

Alokasi Pagu DIPA Awal dan Pagu DIPA-Revisi Tahun 2010 akan disampaikan pada tabel di bawah ini:



**Tabel 2.7 Perbandingan Alokasi Pagu DIPA Awal dengan Pagu DIPA Revisi Ditjen Hubla Tahun 2011**

( Rp. 000 )

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>PAGU AWAL (Rp)</b>	<b>DIPA REVISI APBN REGULER (Rp)</b>	<b>TOAL PAGU DIPA APBN (Rp)</b>
1	Belanja Pegawai	792.192.316	793.079.356	793.079.356
2	Belanja Barang	1.262.903.293	1.571.746.760	1.529.254.016
	Rupiah murni (RM)	1.104.707.340	1.414.150.207	
	PNBP	157.795.953	157.196.553	
	Rupiah Murni Pendamping	400.000	400.000	
	PHLN	-	-	-
3	Belanja Modal	4.950.109.144	4.734.749.305	5.445.848.974
	Rupiah murni (RM)	4.390.542.644	4.080.812.137	
	PNBP	49.720.500	49.720.500	
	Rupiah Murni Pendamping	4.450.000	4.450.000	
	PHLN	505.396.000	599.766.668	
	<b>JUMLAH RAYA</b>	<b>7.005.204.753</b>	<b>7.099.575.421</b>	<b>7.768.182.346</b>

**Catatan :**

- 1) Terdapat tambahan alokasi dana PHLN untuk kegiatan Maritime Telecommunication System Devp. Project (JICA) sebesar Rp. 91.407.268.000,- dan tambahan alokasi dana hibah untuk kegiatan VTS Northern Part (NORAD) sebesar Rp. 2.963.400.000,-
- 2) Terdapat tambahan Pagu, antara lain :
 

Pagu Pencantuman	: Rp. 94.370.668.000,-
APBN-P TA. 2011	: Rp. 320.289.128.000,-
Reward	: Rp. 8.789.128.000,-
ABT	: Rp. 311.500.000.000,-
Pemanfaatan Penghematan	: Rp. 484.000.000.000,-

Adapun target pencapaian Indikator Kinerja Sasaran dengan penggunaan APBN-P akan diuraikan pada tabel 2.4 berikut:



**Tabel 2.8 Target Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Ditjen Hubla pada APBN-P Tahun 2011**

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
<b>SASARAN 3</b>			
<b>Meningkatnya Pelayanan Kepelabuhanan Nasional melalui peningkatan kapasitas sarana dan prasarana</b>			
1	Pembangunan lanjutan/rehab pelabuhan	Lokasi	26

#### 2.4.2 Pagu Penghematan dan Pemanfaatan Ditjen Hubla Tahun 2010

Adapun alokasi pemanfaatan pagu penghematan tahun 2011 adalah pada Kegiatan dukungan administrasi dan teknis .

#### 2.5 Alokasi Anggaran APBN Pada Masing-masing Kegiatan Tahun 2011

Selanjutnya sesuai Pagu Definitif bahwa alokasi anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2011 adalah sebesar **Rp 7.009.132.280,-** untuk sub sektor Transportasi Laut adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.9 Alokasi Anggaran Pada Masing-masing Kegiatan Tahun 2011**

NO	KEGIATAN	PAGU
1	Dukungan Manajemen & Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Hubla	Rp. 1.919.855.851
2	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Lalu Lintas Angkutan Laut	Rp. 430.314.768
3	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan	Rp. 3.883.459.063
4	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Perkapalan dan Kepelautan	Rp.



NO	KEGIATAN	PAGU	
5	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Kenavigasian	Rp.	508.907.457
6	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Penjagaan Laut dan Pantai	Rp.	266.595.142
<b>TOTAL</b>		<b>Rp</b>	<b>7.009.132.280</b>

## 2.6 Kegiatan-kegiatan Prioritas Ditjen Hubla Tahun 2011

Adapun yang merupakan beberapa Kegiatan-kegiatan Prioritas Ditjen Hubla Tahun 2011 adalah:

- a. Kegiatan yang terdapat pada UKP4, meliputi:

**Tabel 2.10 Kegiatan Ditjen Hubla Tahun 2011 yang terdapat pada UKP4**

NO	URAIAN	ANGGARAN (000,-)
1.	Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Pantoloan Tahap IV termasuk supervisi	35.000.000
2.	Pengerukan Alur Pelayaran/Kolam Pelabuhan Ternate	16.337.092
3.	Penyelesaian pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Ahmad Yani-Ternate	10.000.000
4.	Lanjutan pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Tg.Tembaga-Probolinggo termasuk supervisi	55.000.000
5.	Lanjutan pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bitung termasuk supervisi	30.000.000
6.	Lanjutan pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Kariangau (Balikpapan) termasuk supervisi	57.500.000
7.	Lanjutan pembangunan dermaga penumpang dumai termasuk supervisi	10.000.000
8.	Penyelesaian Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Arar/Sorong Tahap III termasuk supervisi	30.000.000
9.	Lanjutan Pembangunan <i>Urgent Rehabilitation of Tg. Priok Port</i>	214.650.757
10.	Pengembangan Pelabuhan Belawan-Medan (prioritas nasional)	25.000.000



**b. Kegiatan yang terdapat dalam koridor MP3EI**

**Tabel 2.11 Kegiatan Ditjen Hubla Tahun 2011 yang terdapat pada koridor MP3EI**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>ANGGARAN (000,-)</b>
	<b>BENOA – NT</b>	
1.	Pengembangan pelabuhan Bima	8.000.000
2.	Lanjutan pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Komodo termasuk supervisi	19.000.000
3.	Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Labuhan Bajo	4.000.000
	<b>JAWA</b>	
1.	Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Kendal	15.000.000
2.	Lanjutan pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Tg.Tembaga - Probolinggo termasuk supervisi	55.000.000
	<b>KALIMANTAN</b>	
1.	Lanjutan pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Kariangau termasuk supervisi	57.500.000
2.	Lanjutan pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Maloy termasuk supervisi	14.000.000
3.	Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Palaihari	12.700.000
4.	Lanjutan pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Penajam Pasir tahap IV termasuk supervisi	10.000.000
5.	Lanjutan pembangunan Faspel Laut Kuala Semboja termasuk supervisi	24.000.000
6.	Pengerukan Alur Pelayaran/Kolam Pelabuhan Pulang Pisau - Muara Kahayan	31.590.000
	<b>PAPUA MALUKU</b>	
1.	Penyelesaian Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bade termasuk supervisi (Selesai)	10.000.000
2.	Lanjutan pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Depapre	20.000.000
3.	Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Sofifi/Kayata termasuk Supervisi	23.000.000
4.	Pengerukan Alur Pelayaran/Kolam Pelabuhan Ternate	16.337.092
5.	Penyelesaian pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Ahmad Yani-Ternate	10.000.000
	<b>SULAWESI</b>	
1.	Lanjutan pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Anggrek termasuk supervisi,	30.000.000
2.	Lanjutan pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bau-Bau	25.000.000
3.	Lanjutan pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bitung termasuk supervisi	30.000.000
4.	Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bungkutoko Tahap III termasuk supervisi	28.000.000



<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>ANGGARAN (000,-)</b>
5.	Lanjutan pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Gorontalo termasuk supervisi	18.000.000
6.	Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Pantoloan Tahap IV termasuk supervisi	35.000.000

**c. Kegiatan yang terdapat pada wilayah terpencil, terluar, daerah perbatasan dan belum berkembang**

**Tabel 2.12 Kegiatan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan pada wilayah terpencil, terluar, daerah perbatasan dan belum berkembang Tahun 2011**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>
<b>I</b>	<b>PROVINSI NTT</b>
	Pembangunan Fas. Pelabuhan Waikelo
	Pembangunan Fas. Pelabuhan Batutua
	Pembangunan Fas. Pelabuhan Papela
	Pembangunan Fas. Pelabuhan Ba'a
<b>II</b>	<b>MALUKU UTARA</b>
	Pembangunan Fas. Pelabuhan Wayabula
	Pembangunan Fas. Pelabuhan Sopi
<b>III</b>	<b>PAPUA</b>
	Pelabuhan depapre
<b>IV</b>	<b>NAD</b>
	Pelabuhan Calang
<b>V</b>	<b>SULAWESI UTARA</b>
	Pembangunan Fas. Pelabuhan Melonguane
	Pembangunan Fas. Pelabuhan Essang
	Pembangunan Fas. Pelabuhan Miangas
	Pembangunan Fas. Pelabuhan kakorotan
	Pembangunan Fas. Pelabuhan Marampit
	Pembangunan Fas. Pelabuhan Karatung
	Pembangunan Fas. Pelabuhan Mangaran



<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>
<b>VI</b>	<b>KEPULAUAN RIAU</b>
	Pembangunan Fas. Pelabuhan Malarko

**Tabel 2.13 Pelayanan Keperintisan Tahun 2011 pada wilayah terpencil, terluar, daerah perbatasan dan belum berkembang**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>
1	Pulau Enggano
2	Pulau Subi
3	Pulau Lirang
4	Pulau Kisar
5	Pulau Leti
6	Pulau Kawio
7	Pulau Marampit
8	Pulau Kakorotan
9	Pulau Kawalurso
10	Pulau Marore
11	Pulau Seba
12	Pulau Liki





## **BAB III**

# **AKUNTABILITAS KINERJA**

## **DITJEN HUBLA TAHUN 2011**

### **3.1 Pengukuran Capaian Kinerja**

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dan suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampaknya. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Untuk melakukan pengukuran kinerja diperlukan indikator kinerja, yang bersifat kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan. Karenanya indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang dapat dihitung dan diukur untuk digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja, baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai atau berfungsi.

Pengukuran tersebut merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Pengukuran kinerja ini mencakup:

- 1. Kinerja Kegiatan** yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat pencapaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan.



**2. Tingkat Pencapaian Sasaran** yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam Dokumen Rencana Kerja. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan.

Pada tahun anggaran 2011, Ditjen Hubla telah menetapkan 6 (enam) sasaran yang akan dicapai. Untuk mengukur pencapaian sasaran tersebut, Ditjen Hubla telah merumuskan indikator Kinerja Utama sebanyak 7 (tujuh) Indikator Kinerja sesuai PM. 85 Tahun 2010 tentang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Perhubungan. Pada peraturan tersebut terdapat sasaran yang belum mempunyai Indikator kinerja yaitu sasaran “Meningkatnya pelayanan dalam rangka perlindungan lingkungan maritim dibidang transportasi laut”. Namun demikian Ditjen Hubla telah merumuskan dan menuangkan usulan tambahan Indikator Kinerja sasaran tersebut dalam Renstra Ditjen Hubla Tahun 2010 – 2014 yaitu “Terpenuhinya kebutuhan pelayanan dalam rangka perlindungan lingkungan maritim melalui studi/kajian, evaluasi dan pengadaan sarana/ prasarana”. Sehingga didalam lampiran Penetapan kinerja Ditjen Hubla Tahun 2011 yang telah ditandatangani oleh Menteri Perhubungan dan Direktur Jenderal Perhubungan Laut terdapat 8 (delapan) indikator Kinerja.

Dalam rangka Revisi RENSTRA Kementerian Perhubungan, Ditjen Hubla telah mengusulkan revisi terhadap Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama serta Target Pencapaiannya sampai tahun 2014. Dimana dalam penyusunan LAKIP ditjen Hubla tahun 2011 hal ini akan digunakan juga sebagai acuan dalam mengukur pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Adapun revisi terhadap Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama serta Target Pencapaiannya tersebut telah disampaikan pada Bab sebelumnya yaitu Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Ditjen Hubla Tahun 2011.

Pada tahun anggaran 2011 keenam sasaran yang selanjutnya direvisi menjadi 5 (lima) sasaran telah dilaksanakan. Untuk mengukur pencapaian sasaran tersebut dapat dilihat dari pencapaian kedelapan indikator kinerja, yang selanjutnya diusulkan untuk revisi menjadi 19 Indikator Kinerja dengan target Indikator kinerja sebanyak 25 (dua puluh lima) target indikator kinerja. Kriteria pencapaian indikator kinerja dinyatakan berhasil adalah jika pencapaiannya di atas 80%.



Pengukuran tingkat capaian kinerja Ditjen Hubla tahun 2011 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

### 3.1.1 Pencapaian Kinerja Ditjen Hubla Tahun 2011 Sesuai Penetapan Kinerja (Indikator Kinerja Utama Ditjen Hubla Pada PM.85 Tahun 2010)

**Tabel 3.1 Pencapaian Kinerja Ditjen Hubla Tahun 2011 Sesuai Indikator Kinerja Utama Pada PM.85 Tahun 2010**

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PROSENTASE CAPAIAN
<b>S A S A R A N 1</b>				
<b>Meningkatkan pelayanan keselamatan pelayaran dan keamanan transportasi laut melalui peningkatan kapasitas sarana dan prasarana</b>				
1.1	Pemb. Baru / lanjutan Mensu/Ramsu/Ramtun	12 Unit	11 Unit	91,67 %
1.2	Replace/ Rehab Mensu/Ramsu/Ramtun	44 Unit	44 Unit	100 %
1.3	Pembangunan Gedung SROP	6 Lokasi	6 Lokasi	100 %
1.4	Pembangunan dermaga kenavigasian	8 Lokasi	8 Lokasi	100 %
1.5	Docking/Rehab Kapal	11 Unit	11 Unit	100 %
1.6	Pembangunan/ lanjutan kapal patroli	38 Unit	38 Unit	100 %
1.7	Pengerukan	22 Lokasi	22 Lokasi	100 %
<b>S A S A R A N 2</b>				
<b>Meningkatkan Pelayanan Angkutan Laut Nasional melalui peningkatan kapasitas sarana dan prasarana</b>				
2.1	Subsidi Operasional Angkutan Laut Perintis	61 Trayek	61 Trayek	100 %
2.2	Jlh pemb baru/lanjutan kapal perintis	8 Kapal	8 Kapal	100 %
<b>S A S A R A N 3</b>				
<b>Meningkatnya Pelayanan Kepelabuhanan Nasional melalui peningkatan kapasitas</b>				



NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PROSENTASE CAPAIAN
<b>sarana dan prasarana</b>				
3.1	Pemb. Pelab. Baru	65 Lokasi	64 Lokasi	98,46 %
3.2	Pemb. Pelab. Lanjutan	149 Lokasi	146 Lokasi	97,99 %
3.3	Rehab/Replace Pelab	23 Lokasi	23 Lokasi	100 %
3.4	Penyelesaian Pemb. Pelab.	25 Lokasi	25 Lokasi	100 %
<b>TOTAL SASARAN 3</b>				
<b>SASARAN 4</b>				
<b>Meningkatnya Kualitas Administrasi Negara di Sektor Transportasi Laut</b>				
4.1	Jumlah Laporan Kajian	48 Laporan Kajian	48 Laporan Kajian	100 %
4.2	Jumlah Laporan monitoring	8 Laporan Monitoring	8 Laporan Monitoring	100 %
<b>SASARAN 5</b>				
<b>Meningkatnya Kualitas SDM serta ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang transportasi laut</b>				
5.1	Jumlah Aplikasi	5 Aplikasi	5 Aplikasi	100 %
<b>SASARAN 6</b>				
<b>Meningkatnya Pemeliharaan dan Kualitas Lingkungan Hidup serta Penghematan Penggunaan Energi di bidang transportasi laut</b>				
6.1	Pengadaan peralatan	4 Jenis Peralatan	4 Jenis Peralatan	100 %
6.2	Survey studi teknis penyingkiran gangguan bawah air, Adpel Pulang Pisau	1 Laporan	1 Laporan	100 %
6.3	Kegiatan Pengadaan Oil Boom 200 Meter	1 Set	1 Set	100 %
6.4	Pengadaan Kendaraan Roda 6 Khusus SAR beserta peralatannya, Disnav Sorong	1 Paket	1 Paket	100 %



### 3.1.2 Evaluasi Dan Analisis Capaian Target Indikator Kinerja Utama Ditjen Hubla (Pm. 85 Tahun 2010) Yang Terdapat Pada Renstra Ditjen Hubla Tahun 2010-2014

Analisis dan evaluasi capaian kinerja Ditjen Hubla tahun 2011 dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### 3.1.2.1 Evaluasi Pencapaian Target Kinerja Sasaran 1

##### Meningkatkan Keselamatan Pelayaran dan Keamanan Transportasi Laut

1) Pemb. Baru / lanjutan Mensu/Ramsu/Ramtun	12 Unit	11 Unit	91,67 %
2) Replace/ Rehab Mensu/Ramsu/Ramtun	44 Unit	44 Unit	100 %
3) Pembangunan / Rehab Gedung SROP	6 Lokasi	6 Lokasi	100 %
4) Pembangunan dermaga kenavigasian	8 Lokasi	8 Lokasi	100 %
5) Docking/Rehab Kapal	11 Unit	11 Unit	100 %
6) Pembangunan/ lanjutan kapal patroli	38 Unit	38 Unit	100 %
7) Pengerukan	22 Lokasi	22 Lokasi	100 %

#### 1) Pemb. Baru / lanjutan Mensu/Ramsu/Ramtun

Kebutuhan Pemb. Baru / lanjutan Mensu/Ramsu/Ramtun yang tercantum pada Renstra sebanyak 70 unit namun terpenuhi hanya sebanyak 11 unit atau sebesar 15,71 % dari total kebutuhan sehingga diharapkan kekurangan sebanyak 59 unit dapat terpenuhi pada tahun berikutnya.

#### 2) Replace/ Rehab Mensu/Ramsu/Ramtun

Kebutuhan Replace/ Rehab Mensu/Ramsu/Ramtun yang tercantum pada Renstra sebanyak 61 unit namun terpenuhi hanya sebanyak 44 unit atau sebesar 72,13 % dari total kebutuhan sehingga diharapkan kekurangan sebanyak 17 unit dapat terpenuhi pada tahun berikutnya.

#### 3) Pembangunan / Rehab Gedung SROP

Kebutuhan Pembangunan Gedung SROP yang tercantum pada Renstra sebanyak 29 lokasi namun terpenuhi hanya sebanyak 6 lokasi atau sebesar 20,69 % dari total



kebutuhan sehingga diharapkan kekurangan sebanyak 23 lokasi dapat terpenuhi pada tahun berikutnya.

#### 4) **Pembangunan dermaga kenavigasian**

Pada Renstra tidak terdapat kebutuhan pembangunan dermaga kenavigasian namun pada tahun 2011 terdapat pembangunan pada 8 (delapan) lokasi.

#### 5) **Docking/Rehab Kapal**

Kebutuhan Docking/Rehab Kapal yang tercantum pada Renstra sebanyak 22 unit namun terpenuhi hanya sebanyak 11 unit atau sebesar 50 % dari total kebutuhan sehingga diharapkan kekurangan sebanyak 11 unit dapat terpenuhi pada tahun berikutnya.

#### 6) **Pembangunan/ lanjutan kapal patroli**

Kebutuhan Pembangunan/ lanjutan kapal patroli yang tercantum pada Renstra sebanyak 26 unit namun terpenuhi sebanyak 38 unit sehingga terdapat pembangunan kapal patroli sebanyak 12 unit yang tidak tercantum dalam Renstra.

#### 7) **Pengerukan**

Kebutuhan Docking/Rehab Kapal yang tercantum pada Renstra sebanyak 27 lokasi namun terpenuhi hanya sebanyak 22 lokasi atau sebesar 81,48 % dari total kebutuhan sehingga diharapkan kekurangan sebanyak 5 lokasi dapat terpenuhi pada tahun berikutnya.

### 3.1.2.2 **Evaluasi Pencapaian Target Kinerja Sasaran 2**

**Meningkatkan Pelayanan Angkutan Laut Nasional melalui peningkatan kapasitas sarana dan prasarana**

2.1	Subsidi Operasional Angkutan Laut Perintis	61 Trayek	61 Trayek	100 %
2.2	Jlh pemb baru/lanjutan kapal perintis	8 Kapal	8 Kapal	100 %

#### 1) **Subsidi Operasional Angkutan Laut Perintis**

Kebutuhan Subsidi Operasional Angkutan Laut Perintis yang tercantum pada Renstra sebanyak 98 trayek namun terpenuhi hanya sebanyak 61 trayek atau sebesar 62,24 % dari total kebutuhan sehingga diharapkan kekurangan sebanyak 37 trayek dapat terpenuhi pada tahun berikutnya.

#### 2) **Jlh pemb baru/lanjutan kapal perintis**

Kebutuhan Jlh pemb baru/lanjutan kapal perintis yang tercantum pada Renstra sebanyak 9 unit kapal namun terpenuhi hanya sebanyak 8 unit kapal atau sebesar



88,89 % dari total kebutuhan sehingga diharapkan kekurangan sebanyak 1 unit kapal dapat terpenuhi pada tahun berikutnya.

### 3.1.2.3 Evaluasi Pencapaian Target Kinerja Sasaran 3

#### Meningkatnya Pelayanan Kepelabuhanan Nasional melalui peningkatan kapasitas sarana dan prasarana

3.1	Pemb. Pelab. Baru	65 Lokasi	64 Lokasi	98,46 %
3.2	Pemb. Pelab. Lanjutan	149 Lokasi	146 Lokasi	97,99 %
3.3	Rehab/Replace Pelab	23 Lokasi	23 Lokasi	100 %
3.4	Penyelesaian Pemb. Pelab.	25 Lokasi	25 Lokasi	100 %

#### Pemb. Pelab. Baru / lanjutan / rehab / penyelesaian

Kebutuhan pelabuhan secara keseluruhan yaitu Pemb. Pelab. Baru / lanjutan / rehab dan penyelesaian yang tercantum pada Renstra sebanyak 228 pelabuhan namun terpenuhi hanya sebanyak 262 lokasi pelabuhan sehingga terdapat 34 lokasi yang tidak terdapat pada Renstra.

### Evaluasi Pencapaian Target Kinerja Sasaran 4 s.d 6

Target rincian sasaran 4 s/d 6 tidak diuraikan pada Renstra sehingga tidak dapat dilakukan evaluasi pencapaian terhadap Renstra.

### 3.2 Pencapaian Kinerja Tahun 2011 Sesuai Revisi Indikator Kinerja Utama Ditjen Hubla Pada PM. 85 Tahun 2010

Tabel 3.2 Pencapaian Kinerja Tahun 2011 Sesuai Revisi IKU Pada PM. 85 Tahun 2010

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	PROSENTASE CAPAIAN
<b>S A S A R A N 1</b>				
<b>Meningkatkan Keselamatan Pelayaran dan Keamanan Transportasi Laut</b>				
1.1	Jumlah kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh manusia	41 kejadian kecelakaan	31 kejadian kecelakaan	132,26 %
1.2	Jumlah kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh alam	80 kejadian kecelakaan	99 kejadian kecelakaan	80,81 %



NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	PROSENTASE CAPAIAN
1.3	Jumlah kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh teknis dan lain-lain	23 kejadian kecelakaan	48 kejadian kecelakaan	47,92 %
1.4	Jumlah kejadian jenis percobaan perompakan dan pencurian pada transportasi laut	6 kejadian	6 kejadian	100 %
<b>SASARAN 2</b>				
<b>Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat terhadap Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi Laut</b>				
2.1	Jumlah rute perintis yang dilayani transportasi laut	61 Rute	61 Rute	100 %
2.2	Jumlah voyage perintis yang dilayani transportasi laut	1.420 Voyage	1.010 Voyage	71,13 %
2.3	Jumlah Kota/daerah yang terhubung oleh transportasi laut	994 Kota/Kab	994 Kota/Kab	100 %
2.4	Jumlah wilayah terpencil, terluar, daerah perbatasan dan daerah belum berkembang yang dilayani oleh angkutan laut perintis	12 Lokasi	12 Lokasi	100 %
<b>SASARAN 3</b>				
<b>Meningkatnya Pelayanan Kepelabuhanan Nasional melalui Peningkatan Kapasitas Pelabuhan</b>				
3.1	Jumlah penumpang transportasi laut yang terangkut	5.657.505 Orang	5.657.505 Orang	100 %
3.2	Jumlah penumpang angkutan laut perintis yang terangkut	225.033 Orang	225.033 Orang	100 %
3.3	Jumlah muatan angkutan laut dalam negeri yang diangkut oleh kapal nasional	316.489.377 ton	316.489.377 ton	100 %
3.4	Jumlah muatan angkutan laut dalam negeri yang diangkut oleh kapal asing	3.779.169 ton	3.779.169 ton	100 %
3.5	Prosentase pangsa muatan kapal nasional untuk angkutan laut dalam negeri	98,82 %	98,82 %	100 %
3.6	Prosentase pangsa muatan kapal nasional untuk angkutan laut luar negeri	9,50 %	9,50 %	100 %



NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	PROSENTASE CAPAIAN
3.7	Prosentase peningkatan produktivitas angkutan laut nasional	3,65 %	3,65 %	100 %
3.8	Jumlah pelabuhan yang mempunyai pencapaian Waiting Time (WT) masih sesuai standar yang telah ditetapkan	24 pelabuhan	20 pelabuhan	83,33 %
3.9	Jumlah pelabuhan yang mempunyai pencapaian Approach Time (AT) masih sesuai standar yang telah ditetapkan	24 pelabuhan	18 pelabuhan	75,00 %
3.10	Jumlah pelabuhan yang mempunyai pencapaian Waktu Efektif (Effective Time/ET) masih sesuai standar yang telah ditetapkan	24 pelabuhan	20 pelabuhan	83,33 %
3.11	Jumlah kebutuhan pelabuhan yang tidak diusahakan pada wilayah terpencil, terluar, daerah perbatasan melalui:			
	a. Pembangunan pelabuhan baru dalam rangka membuka outlet yang belum terlayani	65 Lokasi	64 Lokasi	98,46 %
	b. Lanjutan Pembangunan Pelabuhan baru dalam rangka menuju keterbukaan outlet	149 Lokasi	146 Lokasi	97,99 %
	c. Pengembangan, rehabilitasi dan replace Fasilitas Pelabuhan dalam rangka pemulihan dan peningkatan Kapasitas Pelabuhan;	23 Lokasi	23 Lokasi	100 %
	d. Penyelesaian Pelabuhan baru dalam rangka mengembangkan potensi ekonomi wilayah	25 Lokasi	25 Lokasi	100 %
<b>S A S A R A N 4</b>				
<b>Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia serta Administrasi Negara di sektor Transportasi Laut</b>				
4.1	Jumlah kebutuhan tenaga <i>Marine Inspector A</i>	30 Orang	30 Orang	100 %
4.2	Jumlah kebutuhan tenaga <i>Marine Inspector B</i>	30 Orang	30 Orang	100 %
4.3	Jumlah Kebutuhan Tenaga PPNS	30 Orang	30 Orang	100 %
4.4	Jumlah kebutuhan tenaga	60 Orang	60 Orang	100 %



NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	PROSENTASE CAPAIAN
	Kesyahbandaran Kelas A			
4.5	Jumlah kebutuhan tenaga Kesyahbandaran Kelas B	120 Orang	120 Orang	100 %
4.6	Jumlah penyelesaian regulasi	5 RPM 1 Keputusan Dirjen	5 RPM Keputusan Dirjen	100 % 100 %
<b>S A S A R A N 5</b>				
<b>Meningkatnya Pemeliharaan dan Kualitas Lingkungan Hidup serta Penghematan Penggunaan Energi di bidang transportasi laut</b>				
5.1	Jumlah Penurunan emisi gas buang (CO2) transportasi laut	1.340,44 mega ton	1.340,44 mega ton	100 %
5.2	Jumlah kebutuhan tenaga penanggulangan pencemaran	30 Orang	30 Orang	100 %
5.3	Jumlah kebutuhan pemilikan sertifikat IOPP (International Oil pollution Prevention)	981 Sertifikat	981 Sertifikat	100 %
5.4	Jumlah kebutuhan pemilikan SNPP (Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran)	1.389 Sertifikat	1.389 Sertifikat	100 %
5.5	Jumlah kebutuhan pemilikan sertifikat bahan cair beracun (Noxious Liquid Substance)	104 Sertifikat	104 Sertifikat	100 %
5.6	Peningkatan pemahaman aparat UPT Ditjen Hubla terhadap pembangunan dan operasional pelabuhan yang berwawasan lingkungan	5 UPT	5 UPT	100 %

### 3.2 Evaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja sesuai Revisi IKU

Analisis dan evaluasi capaian kinerja Ditjen Hubla tahun 2011 dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### 3.2.1 Evaluasi Pencapaian Target Kinerja Sasaran 1

##### **Meningkatkan Keselamatan Pelayaran dan Keamanan Transportasi Laut**



Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan peningkatan pelayanan di bidang keselamatan pelayaran dan keamanan Transportasi Laut. Dalam rangka mendukung tercapainya target Indikator Kinerja Utama pada sasaran tersebut maka terdapat pencapaian beberapa Indikator Kinerja Utama yang terkait.

**Tabel 3.3**  
**Pencapaian Kinerja Tahun 2011 Sesuai Usulan Revisi Indikator Kinerja Utama**  
**Pada PM. 85 Tahun 2010**

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	PROSENTASE CAPAIAN
<b>S A S A R A N 1</b>				
<b>Meningkatkan Keselamatan Pelayaran dan Keamanan Transportasi Laut</b>				
1.1	Jumlah kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh manusia	41 kejadian kecelakaan	31 kejadian kecelakaan	132,26 %
1.2	Jumlah kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh alam	80 kejadian kecelakaan	99 kejadian kecelakaan	80,81 %
1.3	Jumlah kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh teknis dan lain-lain	23 kejadian kecelakaan	48 kejadian kecelakaan	47,92 %
1.4	Jumlah kejadian jenis percobaan perompakan dan pencurian pada transportasi laut	6 kejadian	6 kejadian	100 %

Tabel 3.3 menunjukkan pencapaian target Indikator Kinerja Utama tahun 2011 pada Sasaran 1 yaitu "Meningkatkan Keselamatan Pelayaran dan Keamanan Transportasi Laut". Jumlah kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh manusia mengalami penurunan sebesar 10 kejadian kecelakaan dimana pada tahun 2010 terdapat 41 kejadian kecelakaan dan pada tahun 2011 mengalami penurunan menjadi 31 kejadian kecelakaan. Dengan demikian Ditjen Hubla telah berhasil menurunkan tingkat kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh manusia dengan meningkatkan pembinaan kepada para aparat Ditjen Hubla yang terkait serta kepada para pihak yang bertanggungjawab kepada kecelakaan kapal yaitu Nahkoda Kapal, Pemilik Kapal/ Perusahaan Pelayaran, Aparat Pengawas dan Penerbit Sertifikat.

- a. Penanggung Jawab Dan Upaya Pencegahan Terjadinya Kecelakaan Kapal
  1. Pihak yang Bertanggung Jawab Atas Kecelakaan Kapal
    - a. Nahkoda Kapal



- b. Pemilik Kapal/ Perusahaan Pelayaran
  - c. Aparat Pengawas
  - d. Penerbit Sertifikat
- b. Kelembagaan
- 1) Peningkatan Fungsi Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran
  - 2) Revitalisasi Peran Syahbandar/ADPEL/UPP
  - 3) Pembentukan Lembaga Otoritas pelabuhan dan Unit Penyelenggara Pelabuhan sesuai dengan UU 17/2008
  - 4) Pembentukan Lembaga Syahbandar sesuai dengan UU 17/2008
  - 5) Pembentukan Lembaga Penjaga laut dan pantai (Sea and Coast Guard) sesuai dengan UU 17/2008
  - 6) Peningkatan koordinasi pelaksanaan sistem informasi pelayaran dan meteorologi maritim
  - 7) Melakukan restrukturisasi dan reformasi terhadap lembaga Klasifikasi Indonesia agar dapat berdiri sendiri sebagai lembaga non profit dan lebih independen dan profesional dalam rangka mendapat pengakuan di IACS
  - 8) Peningkatan koordinasi dengan Dinas Perhubungan Propinsi dan Kabupaten/Kota untuk meningkatkan pengawasan keselamatan pelayaran kapalrakyat dan kapal yang berukuran dibawah 7 GT.
- c. Sumberdaya Manusia
- 1) Peningkatan Diklat Teknis Ahli Nautika Tingkat (ANT) I-IV, Ahli Teknik Tingkat (ATT) I-IV;
  - 2) Peningkatan Diklat Teknis *Marine Inspector*
  - 3) Peningkatan Diklat Teknis Pengukuran Kapal, Pendaftaran & Kebangsaan Kapal;
  - 4) Peningkatan Diklat Teknis Kepanduan;
  - 5) Peningkatan Diklat Teknis *Global Marine Distress Safety System (GMDSS)*, SBNP, dan Radar Simulator Arpha Simulator
  - 6) Peningkatan Diklat Teknis Kesyahbandaran
  - 7) Peningkatan Diklat Teknis KPLP
  - 8) Peningkatan Diklat Teknis Keselamatan Pelayaran Ahli ISPS-Code, Port State Control Officer
  - 9) Peningkatan Diklat Teknis Keselamatan Pelayaran Ahli Basic Safety
  - 10) Peningkatan Diklat Teknis Keselamatan Pelayaran Ahli Advance Fire Fighting



- 11) Peningkatan Diklat Teknis Keselamatan Pelayaran Ahli ISM Code
- 12) Peningkatan Diklat Teknis Keselamatan Pelayaran Ahli Ship Security Officer
- 13) Peningkatan Diklat Teknis Keselamatan Pelayaran Ahli VTS, Operator Basic and Advance, VTS Supervisor, VTS on-the-Job Training, VTS Instructor
- 14) Peningkatan Diklat Teknis Pengelola National Data Centre (NDC) Long Range Identification and Tracking of Ships (LRIT)
- 15) Peningkatan Diklat Teknis Keselamatan Pelayaran Ahli Teknisi Telekomunikasi Pelayaran Tingkat I-III

d. Operator

- 1) Pelaporan pelaksanaan perawatan kapal secara berkala (*Planned Maintenance System*).
- 2) Peningkatan pengetahuan operator melalui pelatihan tentang keselamatan pelayaran *Global Maritime Distress and Safety System* (GMDSS).

a. Masyarakat

- 1) Meningkatkan Sosialisasi bidang keselamatan pelayaran dan sosialisasi tentang barang / bahan Berbahaya.
- 2) Membuka kotak pengaduan (web site dan SMS) masyarakat, konsumen dan operator.
- 3) Mengadakan program Gerakan Sadar Keselamatan Pelayaran secara Nasional setiap tahun khususnya di pelabuhan-pelabuhan yang banyak melayani kapal-kapal penumpang dan kapal-kapal penyeberangan.

b. Penegakan Hukum

- 1) Peningkatan pemeriksaan kelaiklautan dan keamanan kapal konvensi dan non konvensi di pelabuhan.
- 2) Peningkatan pemeriksaan kapal dalam penerbitan surat persetujuan berlayar.
- 3) Peningkatan pemeriksaan fasilitas pokok pelabuhan secara berkala.
- 4) Peningkatan pengawasan pengadaan, pemasangan, pembangunan dan pemeliharaan fasilitas alur pelayaran sungai dan danau dan pengawasannya.
- 5) Peningkatan pengawasan terhadap telekomunikasi pelayaran.
- 6) Peningkatan pengawasan penyiaran berita marabahaya, berita segera, berita keselamatan, dan siaran tanda waktu standard.
- 7) Peningkatan pengawasan penyebarluasan berita tentang meteorologi



di bidang maritim.

- 8) Peningkatan pengawasan terhadap bangunan atau instalasi di perairan serta zona keamanan dan keselamatan berlayar.
- 9) Peningkatan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan teknis keselamatan dan keamanan berlayar, tata ruang perairan dan tata perairan khusus untuk pekerjaan di sungai dan danau.
- 10) Peningkatan pengawasan terhadap pemanduan di perairan wajib pandu dan pandu luar biasa.
- 11) Peningkatan pengawasan terhadap material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan, dan elektronika kapal penumpang dan barang baik untuk kapal konvensi maupun non konvensi.
- 12) Peningkatan pengawasan terhadap kelaikan kapal penangkap ikan.
- 13) Peningkatan pengawasan melekat dalam pemeriksaan, pengujian dan penilaian keselamatan kapal.
- 14) Peningkatan pengawasan terhadap pemeliharaan kapal secara berkala dan sewaktu-waktu.
- 15) Peningkatan pengawasan terhadap standard dan persyaratan teknis perlengkapan navigasi atau elektronika kapal sesuai dengan jenis, ukuran dan daerah pelayarannya.
- 16) Peningkatan pengawasan terhadap standard dan persyaratan teknis peralatan meteorologi sesuai dengan jenis, ukuran dan daerah pelayarannya.
- 17) Peningkatan pengawasan terhadap standar dan persyaratan kualifikasi dan kompetensi awak kapal sesuai dengan jenis, ukuran dan daerah pelayarannya.
- 18) Peningkatan pengawasan terhadap garis muat dan pemuatan kapal.
- 19) Peningkatan pengawasan manajemen keselamatan kapal.
- 20) Pembebasan tugas kepada petugas di lapangan yang melakukan kesalahan (Syahbandar dan Marine Inspector) .
- 21) Pemeriksaan khusus menyeluruh dengan melakukan Condition Assesment Survey (CAS) Terhadap Persyaratan Keselamatan bagi pengoperasian kapal Ferry Ro-Ro di dalam negeri yang telah berumur 25 tahun.



- 22) Memberikan sanksi tegas kepada operator yang tidak melaksanakan ketentuan, dan pencabutan ijin bagi operator yang tidak disiplin atau tidak memenuhi ke kewajiban keselamatan transportasi laut.

Jumlah kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh alam mengalami peningkatan sebesar 19 kejadian kecelakaan dimana pada tahun 2010 terdapat 80 kejadian kecelakaan dan pada tahun 2011 mengalami peningkatan menjadi 99 kejadian kecelakaan. Dengan demikian Ditjen Hubla belum berhasil menurunkan tingkat kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh alam. Namun Ditjen Hubla telah berupaya dengan berbagai kebijakan antara lain dengan mengirimkan Maklumat Pelayaran tentang Kondisi Cuaca di Perairan Indonesia. Para penanggungjawab penyelenggara di pelabuhan diminta untuk segera memberikan informasi tentang cuaca buruk dan tidak memberikan izin berlayar apabila dianggap sangat buruk dan mempunyai resiko tinggi untuk berlayar. Upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam rangka pencegahan kecelakaan yang disebabkan oleh alam adalah melalui

1. Maklumat Pelayaran tentang Kondisi Cuaca di Perairan Indonesia
  - a. Telegram Perihal Pengamanan Hari Raya Natal dan Tahun Baru.
  - b. Telegram Perihal Kesiapan Menghadapi Cuaca Buruk di Laut atau sejenisnya.
  - c. Telegram Perihal Peningkatan dan Pembinaan dan Pengawasan Kelaik Lautan Kapal.
  - d. Telegram Perihal Peningkatan Pengawasan Kelaiklautan Kapal sehubungan dengan banyaknya musibah yang terjadi.
  - e. Telegram Perihal Antisipasi Kebakaran Kapal di Dermaga.
  - f. Telegram Perihal Peningkatan Pengawasan Kelaik Lautan Kapal.
  - g. Telegram Perihal Bantuan SAR Pada Setiap Kecelakaan Kapal.
  - h. Telegram Perihal Peningkatan Pengawasan Keselamatan Pelayaran.
  - i. Telegram Perihal Penundaan Berlayar untuk Waktu Tertentu.
2. Upaya Yang Dilakukan Ditjen Hubla Untuk Mencegah Terjadinya Kecelakaan Kapal
  - a. Pemenuhan Ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. KM. 01 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar
  - b. Mengirimkan Maklumat Pelayaran tentang Kondisi Cuaca di Perairan Indonesia
  - c. Melakukan Uji Petik Kelaiklautan Kapal
  - d. Meningkatkan Kompetensi Syahbandar dan Marine Inspector



- e. Pencegahan Terjadinya Kebakaran di Kapal
- f. Melakukan Kampanye Keselamatan Pelayaran
- g. Pengaktifan pemantauan dan monitoring kapal melalui radio pantai
- h. Peningkatan patroli laut di perairan yang rawan kecelakaan

Jumlah kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh teknis dan lain-lain mengalami peningkatan sebesar 25 kejadian kecelakaan dimana pada tahun 2010 terdapat 23 kejadian kecelakaan dan pada tahun 2011 mengalami peningkatan menjadi 48 kejadian kecelakaan. Dengan demikian Ditjen Hubla belum berhasil menurunkan tingkat kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh teknis dan lain-lain. Ditjen Hubla telah berupaya untuk menurunkan kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh teknis dan lain-lain dengan berbagai kebijakan antara lain:

1. Upaya-upaya Pencegahan Kecelakaan Kapal
  - a. Penerapan peraturan perundang-undangan secara konsisten
  - b. Pemeriksaan saat diberikan SPB/*Port Clear* (Fisik, Dokumen, Jumlah dan Ijasah ABK) Termasuk muatan dan Penumpang
  - c. Patroli laut ditingkatkan (Pangkalan PLP dan Syahbandar)
  - d. Pemantauan kapal melalui Radio Pantai. (*Ship Reporting System*)
2. Tindakan Preventif Kecelakaan Kapal
  - a. Pemberitahuan Mapel Kepada *Stakeholders* Terkait.
  - b. Peningkatan Patroli Laut.
  - c. Diadakan Latihan-Latihan Diatas Kapal.
  - d. Penyuluhan Keselamatan Pelayaran.
3. Tindakan Represif Kecelakaan Kapal
  - a. Tindakan/ Hukuman Bagi Siapapun Penyebab Kecelakaan Kapal.
  - b. Penundaan Kapal Yang *Overdraft*/Lebih Penumpang.
  - c. Tindakan Keras Bagi Aparat Yang Tidak Disiplin.
  - d. Mencabut SIUP Bagi Perusahaan Yang Tidak Disiplin.
4. Pemeriksaan Kelaiklautan Kapal
  - a. Pemeriksaan Administratif (sesuai *checklist*), pemeriksaan kelengkapan dan validitas sertifikat dan surat-surat kapal;
  - b. Pemeriksian fisik diatas kapal (sesuai *checklist*), pemeriksaan kondisi NTR serta



pemuatan dan stabilitas kapal

5. Hal-hal yang dilakukan dalam upaya pemenuhan Roadmap to Zero Accident dengan menerbitkan regulasi, meliputi:
  - 1) Permenhub No KM 01/2010 ttg Tatacara penerbitan surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*)
  - 2) Permenhub No PM 26/2011 ttg SBNP
  - 3) Permenhub No PM 26/2011 ttg Telekomunikasi Pelayaran
  - 4) Permenhub No PM 52/2011 ttg Pengerukan dan Reklamasi
  - 5) Permenhub No PM 53/2011 ttg Pemanduan
  - 6) Permenhub No PM 68/2011 ttg Alur Pelayaran di laut
  
6. Prasarana
  - 1) Pembangunan SBNP
  - 2) Pembangunan Kapal Navigasi
  - 3) Pembangunan Telekomunikasi Keselamatan Pelayaran
  - 4) Pembangunan dan rehabilitasi Kapal patroli
  - 5) Pengadaan peralatan CCTV
  - 6) Pengerukan alur pelayaran
  - 7) Peningkatan Pembangunan Faspel dan Kospel di Daerah terisolasi Terpencil , Kawasan Tertinggal dan Pulau-Pulau Terluar
  - 8) Peningkatan Fasilitas dan Peralatan Stasiun Radio Pantai
  - 9) Peningkatan Fasilitas Sarana Perangkatan dan Elektronika pada wilayah VTS
  - 10) Peningkatan Fasilitas LRIT
  - 11) Peningkatan Peralatan Komunikasi Marabahaya dan Keselamatan GMDSS dengan Menggunakan Jaringan Radio Terrestrial Maupun Satelit
  - 12) Peningkatan Jumlah Dermaga Kapal Negara Kenavigasian Untuk Peningkatan Kesiagaan dan Mendukung Keandalan SBNP
  - 13) Peningkatan national data center (NDC) untuk LRIT
  
7. Sarana
  - 1) Pengawasan Pemeliharaan Kapal Secara Berkala dan Sewaktu-waktu
  - 2) Pengawasan dan Penyediaan Perlengkapan Navigasi Elektronika Kapal yang Memenuhi Persyaratan Sesuai dengan Jenis, Ukuran dan Daerah Pelayaran



- 3) Peningkatan Pemenuhan Persyaratan Manajemen Keselamatan Kapal oleh Pemilik/Operator Kapal (*Document of Compliance* dan *Safety Management Certificate*)
  - 4) Peningkatan Kuantitas Keandalan dan Pengembangan Teknologi Sarana Telekomunikasi Pelayaran
  - 5) Peningkatan aksesibilitas melalui pelayanan pelayaran angkutan laut perintis secara nasional (61 trayek) dan pembangunan kapal-kapal perintis
  - 6) Peningkatan Kuantitas Keandalan dan Pengembangan Teknologi Kapal Negara (Patroli KPLP dan Kenavigasian)
  - 7) Penataan Alur dan Lokasi Perairan, Implementasi VTS dan Perumusan dan Penetapan Ketentuan Terkait dengan Keselamatan Pelayaran Sehubungan dengan Kegiatan Lepas Pantai
  - 8) Pengkajian Kelayakan dan Pengadaan Peralatan Pengamanan CCTV di Pelabuhan yang Terbuka bagi Pelayaran Luar Negeri dan Pelabuhan yang ditetapkan untuk melayani angkutan lebaran dan natal.
  - 9) Melakukan Kajian mengenai Pro Totipe Kapal-Kapal yang Mengangkut Penumpang dan Barang yang Sesuai untuk wilayah-Wilayah Tertentu
8. Penerbitan Sertifikat Terkait Pencegahan Kecelakaan

Salah satu upaya pencegahan kecelakaan adalah dengan penerbitan beberapa sertifikat kapal. Perkembangan pemberian sertifikat kapal pada tahun 2011 baik jenis maupun jumlah pemberian sertifikat akan diuraikan pada tabel berikut ini.

**Tabel 3.4 Penerbitan Sertifikat Kapal Tahun 2011**

NO	JENIS SERTIFIKAT	JUMLAH	KETERANGAN
<b>I</b>	<b>Pengeluaran Sertifikat Kapal</b>		
1	Keselamatan a. Konstruksi b. Perlengkapan c. Radio	1.784 1.079 1.180	Sertifikat Sertifikat Sertifikat
2	Keselamatan Kapal Penumpang	38	Sertifikat
3	Keselamatan Kapal Cepat (HSC)	245	Sertifikat
4	Keselamatan Kapal Ikan	67	Sertifikat
5	Pengangkutan Barang Berbahaya	432	Sertifikat
6	Kelayakan Barang Berbahaya (Fitness)	-	Sertifikat
7	Pembebasan	72	Sertifikat
	<b>Penerbitan Sertifikat Lambung</b>		



NO	JENIS SERTIFIKAT	JUMLAH	KETERANGAN
	<b>Timbul Kapal</b>		
1	Dalam Negeri	239	Sertifikat
2	Luar Negeri	62	Sertifikat

9. Tingkat Kecukupan dan Keandalan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)  
Tingkat Kecukupan dan Keandalan SBNP harus diperhatikan sesuai standard yang ditentukan dalam rangka menurunkan tingkat kejadian kecelakaan.

**Tabel 3.5**  
**Tingkat Kecukupan dan Keandalan SBNP Tahun 2010 dan 2011**

NO	Uraian	2010	2012	Pertumbuhan
1	Tingkat Kecukupan SBNP	62,64 %	63,51 %	0,87 %
2	Tingkat Keandalan SBNP	91,43	92,85 %	1,42 %

Tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat kecukupan dan keandalan SBNP masih rendah dan berada di bawah standard yang ada, dimana untuk tingkat kecukupan diharapkan dapat berada di atas 70 % sedangkan untuk tingkat keandalan minimal 95 %. Dengan demikian pada tahun berikutnya dapat ditingkatkan alokasi anggaran pembangunan untuk meningkatkan tingkat kecukupan sedangkan untuk meningkatkan tingkat keandalan dengan meningkatkan pemeliharaan SBNP serta pengawasan terhadap terjadinya kehilangan SBNP yang terpasang.

Terkait gangguan keamanan Transportasi laut, terdapat kejadian jenis percobaan perompakan dan pencurian sebanyak 6 (enam) kejadian pada tahun 2011 dan diharapkan pada tahun yang akan mendatang gangguan keamanan dapat diturunkan.

**Tabel 3.6**  
**Data Kecelakaan Berdasarkan Jenis dan Faktor Penyebab Kecelakaan Tahun 2010 dan 2011**

JENIS KECELAKAAN	TAHUN				Naik/Turun (Prosentase) 2010 - 2011
	2008	2009	2010	2011	
<b>KEJADIAN :</b>					
Tenggelam	54 (40%)	41 (33%)	49 (33%)	58 (33%)	
Kebakaran	22 (16%)	26 (21%)	18 (12%)	30 (17%)	



Tubrukan	15 (11%)	16 (13%)	17 (11%)	14 (8%)	
Kandas / Hanyut	17 (12%)	19 (15%)	35 (23%)	35 (19%)	
Lain-lain (kerusakan mesin, kapal menyenggol ramsu/dermaga, orang jatuh ke laut)	30 (21%)	22 (18%)	32 (21%)	41 (23%)	
<b>Jumlah</b>	<b>138</b>	<b>124</b>	<b>151</b>	<b>178</b>	<b>Naik 17,88 %</b>
<b>KORBAN JIWA :</b>					
Meninggal	92	247	198	343	
<b>FAKTOR PENYEBAB :</b>					
Manusia	37(22%)	52 (42%)	43 (28%)	31 (17%)	Turun 11%
Alam	75 (55%)	41 (33%)	84 (56%)	99 (56%)	-
Teknis dan lain-lain	26 (18%)	31 (25%)	24 (16%)	48 (27%)	Naik 11 %
<b>Jumlah</b>	<b>138</b>	<b>124</b>	<b>151</b>	<b>178</b>	<b>Naik 17,88 %</b>

**Tabel 3.7**  
**Data Kecelakaan Berdasarkan Jenis Kapal**  
**Tahun 2010 dan 2011**

JENIS KECELAKAAN	TAHUN				Naik/Turun (Prosentase) 2010 - 2011
	2008	2009	2010	2011	
<b>BENDERA KAPAL:</b>					
Indonesia	128 (92%)	116 (94%)	142 (94%)	173 (94%)	
Bendera Asing	10 (8%)	8 (6%)	9 (6%)	12 (6%)	
<b>Jumlah</b>	<b>138</b>	<b>124</b>	<b>151</b>	<b>185</b>	
<b>UKURAN KAPAL :</b>					
GT < 7	20 (13%)	12 (10%)	6 (14%)	25 (13%)	



GT 7 – 35	21 (14%)	24 (19%)	7 (13%)	39 (20%)	
GT 35 – 500	41 (30%)	55 (44%)	54 (44%)	63 (32%)	
GT > 500	56 (43%)	33 (27%)	33 (29%)	58 (35%)	
<b>Jumlah</b>	<b>138</b>	<b>124</b>	<b>151</b>	<b>185</b>	
<b>JENIS KAPAL :</b>					
Kapal Motor	80 (58%)	78 (63%)	80 (53%)	120 (62%)	
Kapal Tradisional/KLM	37 (27%)	18 (15%)	26(19%)	35 (21%)	
Kapal Tug Boat (TB)	13 (9%)	24 (19%)	34 (23%)	22 (13%)	
Kapal Tongkang	8 (6%)	4 (3%)	8 (5%)	8 (4%)	
<b>Jumlah</b>	<b>138</b>	<b>124</b>	<b>151</b>	<b>185</b>	





### 3.2.2 Evaluasi Pencapaian Target Kinerja Sasaran 2

#### Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat terhadap Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi Laut

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2011	REALISASI	PROSENTASE CAPAIAN
<b>S A S A R A N 2</b>				
<b>Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat terhadap Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi Laut</b>				
2.1	Jumlah rute perintis yang dilayani transportasi laut	61 Rute	61 Rute	100 %
2.2	Jumlah voyage perintis yang dilayani transportasi laut	1.420 Voyage	1.010 Voyage	71,13 %
2.3	Jumlah Kota/daerah yang terhubung oleh transportasi laut	994 Kota/Kab	994 Kota/Kab	100 %
2.4	Jumlah wilayah terpencil, terluar, daerah perbatasan dan daerah belum berkembang yang dilayani angkutan laut perintis	12 Lokasi	12 Lokasi	100 %

Pencapaian indikator kinerja 2.1 yaitu "Jumlah rute perintis yang dilayani transportasi laut " adalah sebesar 100 % dimana target dan realisasi jumlah rute perintis yang dilayani pada



tahun 2011 sebesar 61 rute. Adapun rincian rute perintis dapat disampaikan pada tabel berikut:

**Tabel 3.8**  
**Data Jaringan Trayek Dan Kebutuhan Kapal**  
**Pelayaran Perintis Tahun Anggaran 2012**

<b>NO.</b>	<b>PANGKALAN</b>	<b>KODE TRAYEK</b>	<b>VOYAGE</b>
1.	MEULABOH	R - 1	18
2.	TELUK BAYUR	R - 2	20
		R - 3	20
3.	BENGGULU	R - 4	26
4.	TG. PINANG	R - 5	33
5.	SINTETE	R - 6	33
		R - 7	23
6.	KOTABARU	R - 8	41
7.	SUKAMARA	R - 9	30
8.	SURABAYA	R - 10	28
9.	TG. WANGI	R - 11	28
10.	BIMA	R - 12	25
11.	KUPANG	R - 13	18
		R - 14	23
		R - 15	23
		R - 16	18
12.	BITUNG	R - 17	25
		R - 18	25
13.	TAHUNA	R - 19	25
14.	PAGIMANA	R - 20	14
15.	KOLONEDALE	R - 21	16
16.	KENDARI	R - 22	21
		R - 23	21
17.	TILAMUTA	R - 24	18
18.	MAKASSAR	R - 25	21
19.	MAMUJU	R - 26	19
20.	AMBON	R - 27	15
		R - 28	19
		R - 29	14
		R - 30	14
		R - 31	23
21.	TUAL	R - 32	17
		R - 33	17
22.	SAUMLAKI	R - 34	17
		R - 35	17
23.	TERNATE	R - 36	23
		R - 37	16
		R - 38	16



<b>NO.</b>	<b>PANGKALAN</b>	<b>KODE TRAYEK</b>	<b>VOYAGE</b>
24.	BABANG	R – 39	19
25.	SANANA	R – 40	18
26.	JAYAPURA	R – 41	25
		R – 42	33
		R – 43	37
		R – 44	28
		R – 45	31
27.	BIAK	R – 46	21
		R – 47	31
		R – 48	25
28.	MERAUKE	R – 94	25
		R – 50	25
		R – 51	25
		R – 52	23
		R – 53	22
		R – 54	22
29.	MANOKWARI	R – 55	23
		R – 56	37
		R – 57	31
		R – 58	28
30.	SORONG	R – 59	23
		R – 60	25
		R – 61	23

Pada tahun 2011 dari total jumlah wilayah terpencil, terluar, daerah perbatasan dan daerah belum berkembang sebanyak 92 lokasi maka terdapat 12 lokasi yang telah dilayani oleh kapal perintis yaitu sebagai berikut:

1. Pulau Enggano;
2. Pulau Subi;
3. Pulau Lirang;
4. Pulau Kisar
5. Pulau Leti;
6. Pulau Kawio;
7. Pulau Marore;
8. Pulau Marampit;
9. Pulau Kakorotan;
10. Pulau Kawalurso
11. Pulau Sebatik;
12. Pulau Liki

Jumlah wilayah terpencil, terluar, daerah perbatasan dan daerah belum berkembang yang dilayani oleh kapal perintis diharapkan meningkat pada masa yang akan datang, sehingga dapat membuka aksesibilitas daerah terisolir dan dapat meningkatkan potensi



ekonomi daerah perbatasan. Sedangkan daerah terluar dan perbatasan yang merupakan beranda depan wilayah Indonesia terhadap negara yang berbatasan akan dapat mempertahankan dan meningkatkan keutuhan bangsa, ketahanan nasional serta meningkatkan potensi ekonomi pada wilayah tersebut.

### 3.2.3 Evaluasi Pencapaian Target Kinerja Sasaran 3

#### Meningkatnya Pelayanan Kepelabuhanan Nasional melalui Peningkatan Kapasitas Pelabuhan

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	PROSENTASE CAPAIAN
<b>S A S A R A N 3</b>				
<b>Meningkatnya Pelayanan Kepelabuhanan Nasional melalui Peningkatan Kapasitas Pelabuhan</b>				
3.1	Jumlah penumpang transportasi laut yang terangkut	5.657.505 Orang	5.657.505 Orang	100 %
3.2	Jumlah penumpang angkutan laut perintis yang terangkut	225.033 Orang	225.033 Orang	100 %
3.3	Jumlah muatan angkutan laut dalam negeri yang diangkut oleh kapal nasional	316.489.377 ton	316.489.377 ton	100 %
3.4	Jumlah muatan angkutan laut dalam negeri yang diangkut oleh kapal asing	3.779.169 ton	3.779.169 ton	100 %
3.5	Prosentase pangsa muatan kapal nasional untuk angkutan laut dalam negeri	98,82 %	98,82 %	100 %
3.6	Prosentase pangsa muatan kapal nasional untuk angkutan laut luar negeri	9,50 %	9,50 %	100 %
3.7	Prosentase peningkatan produktivitas angkutan laut nasional	3,65 %	3,65 %	100 %
3.8	Jumlah pelabuhan yang mempunyai pencapaian Waiting Time (WT) masih sesuai standar yang telah ditetapkan	24 pelabuhan	20 pelabuhan	83,33 %
3.9	Jumlah pelabuhan yang mempunyai pencapaian Approach Time (AT) masih	24	18	75,00 %



NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	PROSENTASE CAPAIAN
	sesuai standar yang telah ditetapkan	pelabuhan	pelabuhan	
3.10	Jumlah pelabuhan yang mempunyai pencapaian Waktu Efektif (Effective Time/ET) masih sesuai standar yang telah ditetapkan	24 pelabuhan	20 pelabuhan	83,33 %
3.11	Jumlah kebutuhan pelabuhan yang tidak diusahakan pada wilayah terpencil, terluar, daerah perbatasan melalui:			
	e. Pembangunan pelabuhan baru dalam rangka membuka outlet yang belum terlayani	65 Lokasi	64 Lokasi	98,46 %
	f. Lanjutan Pembangunan Pelabuhan baru dalam rangka menuju keterbukaan outlet	149 Lokasi	146 Lokasi	97,99 %
	g. Pengembangan, rehabilitasi dan replace Fasilitas Pelabuhan dalam rangka pemulihan dan peningkatan Kapasitas Pelabuhan;	23 Lokasi	23 Lokasi	100 %
	h. Penyelesaian Pelabuhan baru dalam rangka mengembangkan potensi ekonomi wilayah	25 Lokasi	25 Lokasi	100 %

### 3.1 Jumlah penumpang transportasi laut yang terangkut

Tabel 3.9  
Perkembangan Angkutan Penumpang Dalam Negeri Tahun 2008 – 2011

NO	TAHUN	JUMLAH PENUMPANG (ORANG)
1	2008	7.197.890
2	2009	7.664.753
3	2010	5.096.851
4	2011	5.657.505

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2011 jumlah penumpang dalam negeri mengalami peningkatan sebesar 560.654 orang atau 11 % dari tahun 2010.



**Tabel 3.10**  
**Perkembangan Muatan Angkutan Laut Dalam Negeri (Nasional & Asing)**  
**Tahun 2008 – 2011**

<b>Tahun</b>	<b>Nasional</b>	<b>Share ( % )</b>	<b>Asing</b>	<b>Share ( % )</b>	<b>Jumlah Muatan (Ton)</b>
2008	192.763.874	79,40	50.126.180	20,6	242.890.054
Perkembangan	44.023.245	29,60	-29.088.178	-36,72	14.935.067
2009	258.359.686	90,2	28.007.688	9,8	286.367.374
Perkembangan	65.595.812	34,03	-22.118.492	-44,13	43.477.320
2010	303.119.578	98,10	5.870.818	1,9	308.990.396
Perkembangan	44.759.892	17,32	-22.136.870	-79,04	22.623.022
2011	316.489.377	98,82	3.779.169	1,18	320.268.546
Perkembangan	13.369.799	4,41	-2.091.649	-35,63	11.278.150

**Tabel 3.11**  
**Perkembangan Muatan Angkutan Laut Luar Negeri**  
**Tahun 2008 – 2011**

<b>Tahun</b>	<b>Nasional</b>	<b>Share ( % )</b>	<b>Asing</b>	<b>Share ( % )</b>	<b>Jumlah Muatan (Ton)</b>
2008	38.196.693	7,12	498.273.709	92,88	536.470.402
Perkembangan	6.814.823	21,72	-2.240.516	-0,45	4.574.307
2009	49.293.953	8,95	501.661.150	91,05	550.955.103
Perkembangan	11.097.260	29,05	3.387.441	0,68	14.484.701
2010	51.162.187	9,02	516.046.091	90,98	567.208.278
Perkembangan	1.868.234	3,79	14.384.941	2,87	16.253.175
2011	55.183.410	9,50	525.694.587	90,50	580.877.997
Perkembangan	4.021.232	7,86	9.648.496	1,87	13.669.719

### 3.2 Jumlah penumpang angkutan laut perintis yang terangkut

Pada tahun 2011 jumlah penumpang angkutan laut perintis yang terangkut sebanyak 225.033 orang.

### 3.3 Jumlah muatan angkutan laut dalam negeri yang diangkut oleh kapal nasional

Jumlah muatan angkutan laut dalam negeri yang diangkut oleh kapal nasional pada tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar 13.369.799 ton atau 4,41 % dimana pada



tahun 2010 sebesar 303.119.578 dan pada tahun 2011 menjadi 316.489.377 ton.

Pencapaian pangsa muatan kapal nasional untuk angkutan laut dalam negeri sebesar 98,82 % dan luar negeri sebesar 9,50 % sehingga pencapaian indikator kinerja 2.1 sebesar 100 %. Untuk lebih jelasnya berikut ini akan disampaikan tabel Perkembangan Muatan Angkutan Laut Dalam Negeri Dan Luar Negeri tahun 2008 s/d 2011.

Adapun Total muatan angkutan laut dalam negeri sebesar 580.877.997 ton dimana yang diangkut kapal nasional sebesar 55.183.410 atau 9,50 % dari total muatan sedangkan yang diangkut oleh kapal asing sebesar 525.694.587 atau 90,50 %. Diharapkan pada masa yang akan datang muatan angkutan laut luar negeri yang diangkut oleh kapal nasional dapat meningkat sebesar 10 %.

- 3.4 Jumlah muatan angkutan laut dalam negeri yang diangkut oleh kapal asing  
Jumlah muatan angkutan laut dalam negeri yang diangkut oleh kapal asing pada tahun 2011 mengalami penurunan sebesar 2.091.649 ton dimana pada tahun 2010 sebesar 5.870.818 dan pada tahun 2011 menjadi 3.779.169 ton
- 3.5 Prosentase pangsa muatan kapal nasional untuk angkutan laut dalam negeri  
Prosentase pangsa muatan kapal nasional untuk angkutan laut dalam negeri pada tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar 0,72 % dimana pada tahun 2010 sebesar 98,10 % dan pada tahun 2011 menjadi 98,82 %. Adapun Total muatan angkutan laut dalam negeri sebesar 320.268.546 ton dimana yang diangkut kapal nasional sebesar 316.489.377 atau 98,82 % dari total muatan sedangkan yang diangkut oleh kapal asing sebesar 3.779.169 atau 1,18 %. Diharapkan pada masa yang akan datang muatan angkutan laut dalam negeri yang diangkut oleh kapal nasional dapat meningkat sebesar 98,85 % sebagai perwujudan dari Azas Cabotage.
- 3.6 Prosentase pangsa muatan kapal nasional untuk angkutan laut luar negeri  
Tabel di atas menunjukkan perkembangan jumlah dan share muatan angkutan laut dalam negeri yang diangkut oleh kapal nasional dan asing pada tahun 2008 s/d 2011. Pada tahun 2011 perkembangan muatan angkutan laut dalam negeri sebesar 11.278.150 ton atau 3,65 % dibanding tahun 2010, dimana target pada tahun 2011



adalah 3,65 sehingga pencapaian indikator kinerja sebesar 100 %.

### 3.7 Prosentase peningkatan produktivitas angkutan laut nasional

Tabel 3.10 di atas menunjukkan perkembangan produktivitas angkutan laut nasional dimana pada tahun 2010 jumlah produktivitas angkutan laut nasional sebesar 308.990.396 ton dan tahun 2011 sebesar 320.268.546 sehingga terjadi peningkatan produktivitas angkutan laut nasional sebesar 11.278.150 ton atau 3,65 %.

### 3.8 Jumlah pelabuhan yang mempunyai pencapaian Waiting Time (WT) masih sesuai standar yang telah ditetapkan

Pada tahun 2011 terdapat 20 pelabuhan atau 83,33 % yang mempunyai pencapaian Waiting Time (WT) masih sesuai standar yang telah ditetapkan dari 24 pelabuhan strategis yang telah ditetapkan standardnya. Adapun pelabuhan yang telah mencapai waiting time di atas standard yang telah ditetapkan pada tahun 2011 yaitu:

- 1) Pelabuhan Belawan
- 2) Pelabuhan Dumai
- 3) Pelabuhan Palembang
- 4) Pelabuhan Samarinda

### 3.9 Jumlah pelabuhan yang mempunyai pencapaian Approach Time (AT) masih sesuai standar yang telah ditetapkan

Pada tahun 2011 terdapat 18 pelabuhan atau 75 % yang mempunyai pencapaian Approach Time (AT) masih sesuai standar yang telah ditetapkan dari 24 pelabuhan strategis yang telah ditetapkan standardnya. Adapun pelabuhan yang telah mencapai Approach Time (AT) di atas standard yang telah ditetapkan pada tahun 2011 yaitu:

- 1) Pelabuhan Dumai
- 2) Pelabuhan Tanjung Pinang
- 3) Pelabuhan Palembang
- 4) Pelabuhan Teluk Bayur
- 5) Pelabuhan Banten
- 6) Pelabuhan Makassar



**3.10 Jumlah pelabuhan yang mempunyai pencapaian Waktu Efektif (Effective Time/ET) masih sesuai standar yang telah ditetapkan**

Pada tahun 2011 terdapat 20 pelabuhan atau 83,33 % yang mempunyai pencapaian Waktu Efektif (Effective Time/ET) masih sesuai standar yang telah ditetapkan dari 24 pelabuhan strategis yang telah ditetapkan standardnya. Adapun pelabuhan yang telah mencapai Waktu Efektif (Effective Time/ET) di atas standard yang telah ditetapkan pada tahun 2011 yaitu:

- 1) Pelabuhan Tj. Priok
- 2) Pelabuhan Makassar
- 3) Pelabuhan Ambon
- 4) Pelabuhan Jayapura

**3.11 Jumlah kebutuhan pelabuhan yang tidak diusahakan pada wilayah terpencil, terluar, daerah perbatasan melalui:**

**a. Pembangunan pelabuhan baru dalam rangka membuka outlet yang belum terlayani;**

Pada tahun 2011 target jumlah pelabuhan baru yang dibangun sebanyak 65 lokasi namun pencapaiannya hanya sebanyak 64 lokasi sehingga pencapaiannya sebesar 98,46 %, sehingga diharapkan pada tahun 2012 untuk pelabuhan baru sebanyak 64 lokasi tersebut dapat menjadi prioritas sebagai lanjutan pembangunan.

**b. Lanjutan Pembangunan Pelabuhan baru dalam rangka menuju keterbukaan outlet;**

Pada tahun 2011 target jumlah Lanjutan Pembangunan Pelabuhan baru sebanyak 149 Lokasi dan yang terlaksana sebanyak 146 Lokasi atau sebesar 97,99 %.

**c. Pengembangan, rehabilitasi dan replace Fasilitas Pelabuhan dalam rangka pemulihan dan peningkatan Kapasitas Pelabuhan**

Pada tahun 2011 target jumlah Pengembangan, rehabilitasi dan replace Fasilitas Pelabuhan sebanyak 23 Lokasi dan pencapaiannya sebesar 100 %.

**d. Penyelesaian Pelabuhan baru dalam rangka mengembangkan potensi ekonomi wilayah**

Pada tahun 2011 target jumlah Penyelesaian Pelabuhan baru sebanyak 25 Lokasi dan pencapaiannya sebesar 100 % dan rincian pelabuhannya disampaikan pada tabel berikut.



**Tabel 3.12**  
**Kinerja Pelayanan Kapal Tahun 2010 - 2011**

No.	Pelabuhan	Standar Kinerja			2010			2011		
		WT Jam	AT Jam	ET:BT (%)	WT Jam	AT Jam	ET:BT (%)	WT Jam	AT Jam	ET:BT (%)
1.	Belawan	1	2	70	2,40	2,09	77,50	1,35	1,38	66,97
2.	Dumai	2	6	80	2,10	6,52	67,25	2,41	6,80	64,43
3.	Sibolga	1	1	70	00,00	00,00	71,24	00,00	00,00	8,00
4.	Lhok Seumawe	1	1	70	1,00	1,13	48,25	0,39	0,93	55,89
5.	Pekanbaru	2	12	70	1,00	8,44	30,20	1,00	9,00	8,00
6.	Tanjung Pinang	1	1	70	00,00	2,00	30,15	0,60	1,48	26,54
7.	Tg. Priok	1	2	80	1,00	1,00	74,05	0,82	1,22	81,34
8.	Panjang	1	1	80	0,54	0,72	54,00	0,45	0,60	62,26
9.	Palembang	1	6	80	0,15	16,00	46,15	0,09	7,20	51,56
10.	Teluk Bayur	1	1	70	0,93	0,8	55,50	0,07	1,01	54,57
11.	Pontianak	1	3	80	1,00	4,00	43,15	0,20	2,50	58,81
12.	Banten	1	1	80	1,00	0,88	82,15	1,00	1,01	76,41
13.	Tg. Perak	2	4	80	1,00	3,00	78,50	2,00	4,00	80,00
14.	Tg. Emas	1	1	80	1,20	1,50	73,25	1,00	1,00	65,00
15.	Banjarmasin	2	4	80	1,00	3,00	72,15	1,00	3,00	79,01
16.	Benoa	1	1	70	0,00	1,50	66,05	0,45	1,00	70,00
17.	Tenau/Kupang	2	1	80	0,00	1,35	93,150	1,30	1,00	65,00
18.	Tanjung Intan	2	2	80	0,35	3,15	74,00	0,45	2,00	55,00
19.	Makassar	1	1	80	1,24	1,55	81,50	0,57	1,67	80,70
20.	Balikpapan	1	2	80	0,07	1,25	93,15	0,50	0,76	76,47
21.	Samarinda	1	5	37	2,00	4,00	44,25	2,00	4,50	62,65
22.	Bitung	1	2	70	0,40	1,00	64,62	0,43	1,00	64,01
23.	Ambon	1	2	70	0,33	0,50	71,24	0,10	0,50	89,12
24.	Jayapura	1	1	70	0,15	0,35	70,24	1,00	1,00	66,67

Sumber Data: PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I, II, III dan IV



**Tabel 3.13**  
**Kinerja Pelayanan Barang Tahun 2010 - 2011**

No.	PELABUHAN	STANDAR					2010					2011				
		GC (T/G/I)	BC (T/G/I)	UN (T/G/I)	CC (T/I)	CK (T/I)	GC (T/G/I)	BC (T/G/I)	UN (T/G/I)	CC (T/I)	CK (T/I)	GC (T/G/I)	BC (T/G/I)	UN (T/G/I)	CC (T/I)	CK (T/I)
1.	Belawan	25	35	45	150	100	22,37	30,35	110,23	153,41	126,93	22,88	55,91	165,92	161,45	166,00
2.	Dumai	25	35	45	150	100	24,45	26,58	36,27	160,00	93,07	24,68	26,34	00,0	137,46	101,92
3.	Tg.Pinang	25	35	45	150	100	23,00	20,49	00,00	00,00	00,00	21,61	9,44	00,00	00,00	00,00
4.	Pekanbaru	20	35	45	150	100	21,18	19,76	00,00	13,43	00,00	35,00	00,00	00,00	111	00,00
5.	Lhok Seumawe	25	35	45	150	100	18,04	26,00	33,23	37,26	142,20	00,00	29,23	36,77	00,00	131,94
6.	Sibolga	20	35	45	150	100	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
7.	Tg. Priok	30	35	45	150	100	43,07	49,76	00,00	121,24	145,14	38,23	40,58	00,00	114,89	139,96
8.	Panjang	20	35	45	150	100	56,40	29,27	00,00	83,82	51,85	51,79	27,49	00,00	149,80	57,56
9.	Palembang	30	35	45	150	100	59,81	41,00	00,00	132,45	148,81	81,95	45,56	138,39	183,78	115,00
10.	Teluk Bayur	30	35	45	150	100	32,00	31,00	69,00	224,00	404,00	52,88	40,92	58,00	215,27	266,88
11.	Pontianak	30	35	45	150	100	24,78	41,68	00,00	00,00	00,00	24,93	50,22	00,00	00,00	00,00
12.	Banten	30	35	45	150	100	27,06	17,00	00,00	119,75	69,14	22,25	17,17	00,00	115,42	126,42
13.	Tg. Perak	30	35	45	150	100	38,00	36,00	46,00	132,00	104,00	20,00	28,00	34,00	80,00	75,00
14.	Tg. Emas	30	35	45	150	100	48,00	24,00	00,00	69,00	140,00	50,40	21,17	35,71	140,09	85,29
15.	Banjarmasin	30	35	45	150	100	16,00	43,00	00,00	00,00	00,00	19,00	35,00	00,00	00,00	00,00
16.	Benoa	30	35	45	150	100	24,00	16,00	00,00	44,00	00,00	15,00	20,00	00,00	35,00	30,00
17.	Tenau/Kupang	25	35	45	150	100	44,00	51,00	17,00	00,00	00,00	25,00	30,00	00,00	00,00	30,00
18.	Tanjung Intan	30	35	45	150	100	00,00	00,00	00,00	00,00	264,00	20,00	25,00	00,00	00,00	80,00
19.	Makassar	25	30	35	150	100	22,21	22,57	00,00	126,00	88,00	22,51	22,96	00,00	126,00	92,82
20.	Balikpapan	20	25	35	150	100	14,00	15,00	00,00	00,00	00,00	14,00	15,00	35,00	150,00	95,00
21.	Samarinda	20	25	35	150	100	19,00	20,00	00,00	00,00	00,00	19,00	20,00	30,00	145,00	95,00
22.	Bitung	20	25	35	150	100	23,00	25,00	00,00	150,00	80,00	22,00	22,00	00,00	150,00	80,00
23.	Ambon	20	25	35	150	100	18,00	43,00	00,00	00,00	00,00	20,00	25,00	00,00	00,0	00,00
24.	Jayapura	20	25	35	150	100	16,00	17,00	20	150,00	00,00	16,00	18,00	35,00	60,00	00,00

Sumber Data: PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I, II, III dan IV



**Tabel 3.14**  
**Daftar Pelabuhan yang telah selesai dibangun pada Tahun 2011**

<b>NO</b>	<b>PENYELESAIAN</b>
1	Pelabuhan Seluan
2	Pelabuhan Tg. Batu – BABEL
3	Pelabuhan Panarukan
4	Pelabuhan Benete
5	Pelabuhan Pamenang
6	Pelabuhan Pulau Ende
7	Pelabuhan Kereng Bengkirai
8	Pelabuhan Melonguane
9	Pelabuhan Essang
10	Pelabuhan Marampit
11	Pelabuhan Tilamuta
12	Pelabuhan Parigi
13	Pelabuhan Banggai
15	Pelabuhan Pagimana
15	Pelabuhan Bonerate
16	Pelabuhan Malili
17	Pelabuhan Sinjai
18	Pelabuhan Balanglombo (Kab. Pangkep)
19	Pelabuhan Belang-Belang
20	Pelabuhan Pasang Kayu
21	Pelabuhan Budong-Budong
22	Pelabuhan Ahmad Yani-Ternate
23	Pelabuhan Bade
24	Pelabuhan Sorong
25	Pelabuhan Arar/Sorong

### 3.10 Monitoring Inpres Nomor 14 Tahun 2011 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional 2011

Hasil pelaksanaan monitoring Inpres Nomor 14 Tahun 2011 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional 2011 pada Sub Sektor Perhubungan Laut yang dipantau oleh Tim Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) yaitu sebagai berikut:

1. Dari 6 (enam) Rencana Aksi yang terdiri dari 11 (sebelas) program kegiatan terdapat 2 program kegiatan yang tidak tercapai yaitu Rencana Aksi Perbaikan Kinerja di Pelabuhan Tanjung Priok, Belawan dan 7 Pelabuhan strategis lainnya dengan program kegiatan sebagai berikut :
  - 1) Terelesaiikannya pengembangan sarana/prasana dermaga di Pelabuhan Belawan;



Hasilnya berupa *Review Design* dan melakukan persiapan lelang untuk pekerjaan konstruksi dengan realisasi pekerjaan saat ini masih menunggu repon/konfirmasi dari pihak IDB atas dokumen TOR, PQ dan RFP (Request for Proposal) *Project Management Supervision Consultant (PMSC)* yang telah disampaikan kepada pihak IDB tersebut. Adapun justifikasi ketidaktercapaian target adalah sebagai berikut :

- a. Pengumuman *expression of interest* untuk PMSC telah diumumkan di Koran Tempo pada tanggal 4 Oktober 2011 dan di *Straits Times* pada tanggal 24 Oktober 2011 serta 8 November 2011 dengan alokasi pendaftaran sampai dengan tanggal 11 November 2011;
  - b. Kelengkapan untuk pelaksanaan tahapan prakualifikasi/*Shortlisting* seperti *Term of Reference (ToR) PMSC*, Dokumen Prakualifikasi dan *Request for Proposal (RfP)* telah dikirimkan ke pihak IDB untuk mendapatkan persetujuan pada tanggal 8 Oktober 2011;
  - c. Berdasarkan ketentuan yang berlaku keseluruhan tahapan proses harus dilaporkan ke pihak IDB untuk mendapatkan *No Objection Letter (NOL)* sebelum tahapan prakualifikasi/*Shortlisting* dilakukan, maka PPK Pekerjaan Pengembangan Pelabuhan Belawan telah mengirimkan kembali kelengkapan dokumen tahapan prakualifikasi/*Shortlisting* tersebut kepada pihak IDB pada tanggal 27 Desember 2011 untuk mendapatkan persetujuan sehingga proses prakualifikasi dapat segera dilaksanakan mengingat pelaksanaan tahapan kegiatan tidak sesuai dengan *schedule* yang telah ditentukan;
  - d. Selanjutnya Direktorat Pelabuhan dan Pengerukan dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan pengembangan Pelabuhan Belawan telah melakukan pengiriman kembali dokumen prakualifikasi/*Shortlisting* tersebut kepada pihak IDB pada tanggal 3 Januari 2012 dan dokumen berupa *form* penilaian tahapan prakualifikasi pada tanggal 12 Januari 2012 namun sampai dengan saat ini masih belum mendapatkan tanggapan/jawaban dari pihak IDB.
- 2) Terelesaiannya perluasan Pelabuhan Tanjung Priok melalui pengembangan sarana/prasana breakwater.

Justifikasi program kegiatan dalam Rencana Aksi sesuai adalah sebagai berikut:

- a. Program kegiatan berupa terelesaiannya pengembangan sarana/prasarana dermaga di Pelabuhan Belawan dengan target B-12
- b. Program kegiatan berupa terelesaiannya perluasan Pelabuhan Tanjung Priok melalui pengembangan sarana/prasarana dengan target B-12 Pelaksanaan kegiatan keruk di alur masuk pelabuhan dan kegiatan demolisation dengan realisasi pekerjaan adalah masih belum dilakukan



penandatanganan kontrak pekerjaan dikarenakan masih menunggu jaminan pelaksanaan dari pihak kontraktor. Adapun justifikasi ketidaktercapaian target adalah sebagai berikut :

- c. Pelaksanaan evaluasi dokumen penawaran berupa evaluasi administrasi dan evaluasi teknis serta penetapan pemenang membutuhkan waktu yang cukup lama yaitu kurun waktu Oktober 2010 sampai dengan September 2011 dikarenakan setiap tahapan harus mendapatkan *approval* dari pihak executive agency JICA Indonesia di Jakarta yang selanjutnya disampaikan kepada pihak JICA di Manila dan terakhir baru disampaikan kepada pihak JICA di Tokyo;
- d. Selanjutnya pada tahapan penyusunan dokumen kontrak mengalami beberapa kendala berupa terdapat klausul yang tidak disepakati oleh pihak kontraktor sehingga dibutuhkan alokasi waktu yang cukup lama dalam proses pembahasannya yaitu kurun waktu Agustus 2011 sampai dengan Desember 2011;
- e. Selain itu sampai saat ini proses penandatanganan kontrak belum dapat dilaksanakan dikarenakan belum adanya jaminan pelaksanaan dari pihak kontraktor.

### 3.2.4 Evaluasi Pencapaian Target Kinerja Sasaran 4

#### Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia serta Administrasi Negara di sektor Transportasi Laut

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	PROSENTASE CAPAIAN
<b>S A S A R A N 4</b>				
<b>Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia serta Administrasi Negara di sektor Transportasi Laut</b>				
4.1	Jumlah kebutuhan tenaga <i>Marine Inspector A</i>	30 Orang	30 Orang	100 %
4.2	Jumlah kebutuhan tenaga <i>Marine Inspector B</i>	30 Orang	30 Orang	100 %
4.3	Jumlah kebutuhan tenaga PPNS	30 Orang	30 Orang	100 %
4.4	Jumlah kebutuhan tenaga Kesyahbandaran Kelas A	60 Orang	60 Orang	100 %



NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	PROSENTASE CAPAIAN
4.5	Jumlah kebutuhan tenaga Kesyahbandaran Kelas B	120 Orang	120 Orang	100 %
4.6	Jumlah penyelesaian regulasi	5 RPM 1 Kep. Dirjen	5 RPM 1 Kep. Dirjen	100 % 100 %

## 1) Pencapaian Target Kinerja

### 4.1 Jumlah kebutuhan tenaga *Marine Inspector A*

Pada tahun 2011 diklat tenaga Marine Inspector A dilaksanakan 1 (satu) angkatan sebanyak 30 orang, dimana kebutuhan tenaga Marine Inspector A sebanyak 60 orang sehingga tingkat kecukupan Marine Inspector A masih 50% atau kekurangan tenaga MI A sebanyak 30 orang

### 4.2 Jumlah kebutuhan tenaga *Marine Inspector B*

Pada tahun 2011 diklat tenaga Marine Inspector B dilaksanakan 1 (satu) angkatan sebanyak 30 orang, dimana kebutuhan tenaga Marine Inspector B sebanyak 120 orang sehingga tingkat kecukupan Marine Inspector B masih 25% atau kekurangan tenaga Marine Inspector B sebanyak 90 orang.

### 4.3 Jumlah kebutuhan tenaga PPNS

Pada tahun 2011 pelatihan tenaga PPNS sebanyak 30 orang.

### 4.4 Jumlah kebutuhan tenaga Kesyahbandaran Kelas A

Pada tahun 2011 jumlah SDM yang mengikuti diklat tenaga Kesyahbandaran A sebanyak 60 orang, dimana kebutuhan tenaga Kesyahbandaran A sebanyak 60 orang sehingga tingkat kecukupan Kesyahbandaran A sudah mencapai 100 %.

### 4.5 Jumlah kebutuhan tenaga Kesyahbandaran Kelas B

Pada tahun 2011 jumlah SDM yang mengikuti diklat tenaga Kesyahbandaran B sebanyak 120 orang, dimana kebutuhan tenaga Kesyahbandaran B sebanyak 120 orang sehingga tingkat kecukupan Kesyahbandaran B sudah mencapai 100 %.

### 4.6 Jumlah penyelesaian regulasi

#### 1) Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda



## 2) Rancangan Peraturan Pemerintah

- Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang telah disampaikan oleh Menteri Perhubungan kepada Presiden untuk dimohonkan penetapan yaitu Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penjagaan Laut dan Pantai (*Sea and Coast Guard*).
- Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang telah dilakukan pembahasan di tingkat Panitia AntarKementerian I dan selanjutnya akan dilakukan pembahasan di tingkat Panitia AntarKementerian II yaitu Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal.
- Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang akan dilakukan pembahasan di tingkat Panitia AntarKementerian yaitu Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Kepelautan dan Fasilitas Kesehatan Kapal Penumpang.

## 3) Peraturan Menteri Perhubungan

- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2011 tentang Sarana Bantu Navigasi Pelayaran;
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun 2011 tentang Telekomunikasi Pelayaran;
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 48 Tahun 2011 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Izin Penggunaan Kapal Asing untuk Kegiatan Lain yang tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang dan/atau Barang dalam Kegiatan Angkutan Laut Dalam Negeri;
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2011 tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri;
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 Tahun 2011 tentang Pengerukan dan Reklamasi;
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 53 Tahun 2011 tentang Pemanduan;



- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2011 tentang Alur Pelayaran di Laut.
- 4) Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan (RPM)
  - Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan (RPM) di bidang pelayaran yang telah dilakukan pembahasan final di Biro Hukum dan KSLN Kementerian Perhubungan dan menunggu penetapan oleh Menteri Perhubungan yaitu Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pendaftaran dan kebangsaan Kapal;
  - Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan (RPM) di bidang pelayaran yang telah disampaikan kepada Biro Hukum dan KSLN Kementerian Perhubungan untuk dilakukan pembahasan yaitu :
    - Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut (telah dilakukan pembahasan di Biro Hukum dan KSLN, namun dikembalikan ke Ditjen Hubla untuk dilengkapi, disempurnakan dan disesuaikan dengan materi muatan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran);
    - Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional (telah dilakukan pembahasan di Biro Hukum dan KSLN, namun dikembalikan ke Ditjen Hubla untuk dilengkapi, disempurnakan dan disesuaikan dengan materi muatan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran);
    - Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pengukuran Kapal;
    - Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tata Cara Audit dan Sertifikasi Manajemen Keselamatan Kapal.

Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan (RPM) di bidang pelayaran yang sedang dalam proses pembahasan di tingkat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut:

- Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian dan Pencabutan Konsesi serta Kerjasama;
- Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut;



- Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan Ke Kapal;
- Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pengesahan Gambar dan Pengawasan Pembangunan serta Pemeriksaan dan Sertifikasi Keselamatan Kapal;
- Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Garis Muat Kapal dan Pemuatan;
- Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penanggulangan Pencemaran di Perairan dan Pelabuhan.

Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut

- 5) Keputusan Dirjen No : Um.002/38/18/Djpl-11 Tentang Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan. Mengatur standar kinerja pelayanan digunakan untuk mengetahui tingkat kinerja pelayanan pengoperasian di pelabuhan, kelancaran dan ketertiban pelayanan serta sebagai dasar pertimbangan untuk perhitungan tarif jasa pelabuhan .

**a. Penerbitan Sertifikat Kepelautan**

Tingkat perkembangan pengeluaran setifikat Kepelautan untuk Ahli Nautika tahun 2011 sesuai dengan penerapan STCW 1978 Amandemen 1995 akan diuraikan pada tabel berikut

**Tabel 3.14**  
**Perkembangan Penerbitan Sertifikat Kepelautan Tahun 2009 – 2011**

<b>NO</b>	<b>JENIS SERTIFIKAT</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>I</b>	<b>Sertifikat Ahli Nautika</b>			
1	ANT - I	430	511	409
2	ANT - II	1.094	1.311	753
3	ANT - III	645	1.175	865
4	ANT - IV	1.154	1.406	981
5	ANT - V	468	2.116	2.150
6	ANT - D	12.529	12.360	
<b>II</b>	<b>Sertifikat Ahli Teknika</b>			



<b>NO</b>	<b>JENIS SERTIFIKAT</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
1	ATT - I	356	416	362
2	ATT - II	849	1.103	599
3	ATT - III	669	1.125	840
4	ATT - IV	600	1.091	877
5	ATT - V	525	1.432	1.579
6	ATT - D	8.731	6.461	
<b>III</b>	<b>Sertifikat Keahlian Kapal Ikan</b>			
1	ANKAPIN I	156	150	116
2	ANKAPIN II	583	474	756
3	ANKAPIN III	1.293	1.417	1.018
4	ATKAPIN I	86	147	67
5	ATKAPIN II	439	380	491
6	ATKAPIN III	618	697	252
<b>IV</b>	<b>Pengeluaran Buku Pelaut</b>			
1	Penggantian	3.070	1.219	1.601
2	Buku Baru	5.121	3.871	5.529
3	Perpanjangan	2.872	3.552	3.217
<b>V</b>	<b>Penyijilan Awak Kapal</b>			
	PKL Asing	5.391	8.436	8.792
	PKL Nasional	187	598	978
<b>VI</b>	<b>Pengukuhan Keahlian Teknik</b>			
	ATT - I	454	263	616
	ATT - II	1.202	817	1.260
	ATT - III	2.232	519	2.499
	ATT - IV	1.554	1.150	1.900
	ATT - V	2.994	1.927	3.178
<b>VII</b>	<b>Pengukuhan Sertifikat Keahlian Nautika</b>			
	ANT - I	599	353	773
	ANT - II	1.327	886	1.513
	ANT - III	2.464	1.786	2.305
	ANT - IV	1.987	965	2.220



NO	JENIS SERTIFIKAT	2009	2010	2011
	ANT - V	3.570	1.665	4.189

### 1) Sertifikat Ahli Nautika

Tingkat perkembangan pengeluaran Pengukuhan Sertifikat Ahli Nautika tahun 2011 sesuai dengan Amandemen 1995. Untuk tahun 2011 pengeluaran Sertifikat Ahli Nautika Tingkat I s/d V mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

### 2) Sertifikat Ahli Teknika

Tingkat perkembangan pengeluaran sertifikat Kepelautan untuk Ahli Teknika sesuai dengan penerapan STCW 1978 Amandemen 1995, hanya ATT-III s/d V serta Tingkat Dasar.

### 3) Sertifikat Keahlian Kapal Ikan

Tingkat penerbitan sertifikat keahlian pelaut untuk kapal penangkap ikan mengalami perubahan pada sertifikat keahlian pelaut nautika tingkat I,II dan sertifikat keahlian pelaut teknik tingkat II terdapat perubahan dari tahun sebelumnya .

### 4) Pengeluaran Buku Pelaut

Perkembangan pemberian Buku Pelaut. Jenis pengeluaran buku pelaut tahun 2011 untuk permintaan Buku Pelaut Baru, Penggantian Buku Pelaut dan pembuatan buku pelaut baru ada kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya serta terjadi penurunan pada perpanjangan buku pelaut.

### 5) Penyijilan Awak Kapal

Tingkat perkembangan Penyijilan Awak Kapal pada tahun 2011. Jumlah Penyijilan Awak Kapal yang bekerja di kapal asing **meningkat** bila dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan untuk kapal nasional juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya .

### 6) Pengukuhan Sertifikat Keahlian Teknika

Tingkat perkembangan pengeluaran Pengukuhan Sertifikat Ahli Teknika sesuai STCW 1978 Amandemen 1995. Jumlah Pengukuhan Sertifikat Ahli Teknika I s/d V



pada tahun 2011 mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

#### **7) Pengukuhan Sertifikat Keahlian Nautika**

Tingkat perkembangan pengeluaran Pengukuhan Sertifikat Ahli Nautika tahun 2011 sesuai dengan Amandemen 1995. Untuk tahun 2011 pengeluaran Sertifikat Ahli Nautika Tingkat I s/d V mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

#### **b. Permasalahan terkait Sumber Daya Manusia adalah sebagai berikut:**

- 1) Pengesahan / approval Program Diklat untuk Lembaga Diklat Kepelautan. Lembaga Diklat yang ada di seluruh Indonesia sejumlah 28, yang terdiri dari 8 UPT dari Badan PPSDM Perhubungan dan 20 (dua puluh) Diklat Non Badan PPSDM Perhubungan.
- 2) Sumber Daya Manusia untuk pengawasan terhadap lembaga diklat kepelautan yang sudah diapprove belum mencukupi.
- 3) Tidak terdapatnya anggaran untuk pengembangan kapasitas server dalam rangka peningkatan storage data internet.

#### **c. Upaya yang dilakukan**

- 1) Untuk pemenuhan Lembaga Diklat Kepelautan yang sesuai STCW 1995, maka telah diambil langkah-langkah dengan memberikan sosialisasi dan bagi lembaga diklat disarankan agar bekerjasama dengan lembaga diklat yang telah diapprove atau dengan instansi yang memiliki peralatan sesuai ketentuan.
- 2) Telah dilakukan koordinasi dengan instansi terkait khususnya Kementerian Luar Negeri dengan memprioritaskan pada negara yang banyak mempekerjakan Pelaut Indonesia.
- 3) Telah diadakan pelatihan 4 personil pengawasan diklat dan masih diperlukan lagi pelatihan bagi staf yang ada baik di Kantor Pusat maupun UPT Adpel pada lokasi yang terdapat Lembaga Diklat Kepelautan.
- 4) Perlu adanya peningkatan dan pengembangan kapasitas storage data internet yang biayanya ditampung dalam anggaran DIPA Ditjen Hubla;



- 5) Penyelenggaraan Workshop Non Convention Vessel Standard (NCVS) bekerjasama dengan ITSAP

### 3.2.5 Evaluasi Pencapaian Target Kinerja Sasaran 5

#### Meningkatnya Pemeliharaan dan Kualitas Lingkungan Hidup serta Penghematan Penggunaan Energi di bidang transportasi laut

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	TARGET	PROSENTASE CAPAIAN
<b>S A S A R A N 5</b>				
<b>Meningkatnya Pemeliharaan dan Kualitas Lingkungan Hidup serta Penghematan Penggunaan Energi di bidang transportasi laut</b>				
5.1	Jumlah Penurunan emisi gas buang (CO <sub>2</sub> ) transportasi laut	1.340,44 mega ton	1.340,44 mega ton	100 %
5.2	Jumlah kebutuhan tenaga penanggulangan pencemaran	30 Orang	30 Orang	100 %
5.3	Jumlah kebutuhan pemilikan sertifikat IOPP (International Oil pollution Prevention)	981 Sertifikat	981 Sertifikat	100 %
5.4	Jumlah kebutuhan pemilikan SNPP (Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran)	1.389 Sertifikat	1.389 Sertifikat	100 %
5.5	Jumlah kebutuhan pemilikan sertifikat bahan cair beracun (Noxious Liquid Substance)	104 Sertifikat	104 Sertifikat	100 %
5.6	Peningkatan pemahaman aparat UPT Ditjen Hubla terhadap pembangunan dan operasional pelabuhan yang berwawasan lingkungan	5 UPT	5 UPT	100 %

#### 1) Pencapaian Target Kinerja

Upaya-upaya yang telah dilaksanakan pada tahun 2011 untuk mendukung pencapaian target kinerja sasaran “Meningkatnya Pemeliharaan dan Kualitas Lingkungan Hidup serta Penghematan Penggunaan Energi di bidang transportasi laut”.

##### 5.1 Penurunan emisi gas buang (CO<sub>2</sub>) transportasi laut

Pada tahun 2011 ditjen hubla telah menurunkan emisi gas buang (CO<sub>2</sub>) dari kapal-kapal yang beroperasi sebesar 1.340,44 mega ton. Penurunan ini diperoleh dengan melakukan beberapa kegiatan antara lain penghematan penggunaan



BBM dan penerbitan sertifikasi kapal yang terkait dengan bahan bakar yang digunakan.

## 5.2 Kebutuhan SDM

Dalam rangka perlindungan lingkungan Maritim, Ditjen Hubla membutuhkan SDM yang mempunyai kompetensi sebagai tenaga penanggulangan pencemaran, penanggulangan kebakaran dan tenaga penyelam. Namun pada tahun 2011 tidak ada dilaksanakan diklat untuk tenaga penanggulangan kebakaran dan tenaga penyelam sehingga diharapkan pada tahun 2012 dapat dilaksanakan diklat tersebut agar dapat terpenuhi kebutuhannya. Rencana kebutuhan tenaga penanggulangan pencemaran sebanyak 1.764 orang dan pada pada tahun 2011 terpenuhi hanya sebanyak 30 orang sehingga jumlah kebutuhan pada tahun 2012 menjadi 1.734 orang.

## 5.3 Penerbitan Sertifikat terkait Pencegahan Pencemaran

Sertifikat yang diterbitkan pada tahun 2011 terkait pencegahan pencemaran yaitu:

**Tabel 3.13**

**Penerbitan Sertifikat terkait Pencegahan Pencemaran Tahun 2011**

<b>NO</b>	<b>JENIS SERTIFIKAT</b>	<b>TAHUN 2011</b>
1	IOPP	981 Sertifikat
2	SNPP	1.389 Sertifikat
3	CNC	395 Sertifikat
4	NLS	104 Sertifikat
5	CAS	12 Sertifikat
6	IAPP	201 Sertifikat
7	ISPP	223 Sertifikat
8	SMC	413 Sertifikat
9	DOC	114 Sertifikat
	<b>TOTAL</b>	<b>3.832 Sertifikat</b>

## 5.4 Peningkatan pemahaman aparat UPT Ditjen Hubla terhadap pembangunan dan operasional pelabuhan yang berwawasan lingkungan

Pada tahun 2011 Ditjen Hubla telah melaksanakan kegiatan Sosialisasi Ecoport



dalam rangka peningkatan pemahaman para aparat Ditjen Hubla yang ada di UPT mengenai pembangunan dan operasional pelabuhan yang berwawasan lingkungan. Adapun sosialisasi dilaksanakan pada 5 (lima) UPT yaitu

- a. UPP Tanah Grogot
- b. UPP Selayar
- c. Adpel Tg. Intan
- d. Adpel Gresik;
- e. UPP Rembang

## **2) Pembahasan Regulasi terkait Pencegahan Pencemaran Transportasi Laut**

- 1) Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim sebagai amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
- 2) Melanjutkan pembahasan draft RPM tentang Manajemen Keselamatan Kapal.
- 3) Melanjutkan pembahasan draft RPM tentang Pencegahan Pencemaran dari Pengoperasian Kapal untuk dibahas di tingkat internal Direktorat Perkapalan dan Kepelautan.
- 4) Melanjutkan rencana ratifikasi Annex III s/d VI MARPOL 73/78.

## **3) Menghadiri pertemuan luar dan mengadakan pertemuan luar negeri**

- 1) Menghadiri sidang-sidang Internasional dan pelatihan-pelatihan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Sub Direktorat Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal;
- 2) Mengusulkan kegiatan temu teknis kelaiklautan kapal;
- 3) Telah dilaksanakan rapat persiapan ratifikasi MARPOL Annex III s.d VI antar Kementerian dan saat ini menunggu diterbitkannya Kepres tentang Ratifikasi Annex III s/d VI Marpol 73/78.
- 4) Melaksanakan uji petik kelaiklautan kapal.
- 5) Melaksanakan kegiatan Workshop Marpol 73/78 pada November 2011



#### **4) Permasalahan terkait Pencegahan Pencemaran Transportasi Laut**

Selama tahun 2011 pembahasan RPM Manajemen Keselamatan Pengoperasian Kapal mengalami penundaan di Bagian Hukum Ditjen Hubla karena banyaknya agenda di Bagian Hukum, seperti pembahasan RPM dari Direktorat lain dan persiapan Indonesia menghadiri sidang Assembly di IMO.

- 1) Selama tahun 2011 pembahasan RPM Pencegahan Pencemaran dari Pengoperasian Kapal mengalami penundaan pembahasan di Internal Ditkapel karena lebih memprioritaskan program ratifikasi Annex III s/d VI Marpol 73/78.
- 2) Ratifikasi Annex III s/d VI Marpol 73/78 terkendala prosedur dari Kementerian Luar Negeri mengenai tatacara ratifikasi peraturan internasional.
- 3) Pemahaman sistem manajemen keselamatan kapal di perusahaan dan kapal masih belum optimal karena kurangnya pemahaman ISM CODE oleh DPA Perusahaan.

#### **5) Upaya Mengatasi Permasalahan**

- 1) Melanjutkan penyusunan dan pembahasan RPM Manajemen Keselamatan Kapal dan RPM Pencegahan Pencemaran dari Pengoperasian Kapal.
- 2) Usulan ratifikasi Annex III s.d VI diupayakan dilanjutkan dengan pembahasan antar kementerian.
- 3) Direncanakan akan dilakukan Bimbingan Teknis Implementasi ISM CODE terhadap DPA/Internal Auditor Perusahaan untuk meningkatkan pemahaman tentang aplikasi system manajemen keselamatan.
- 4) Mengikuti Rountable Discussion Kementerian Perhubungan.
- 5) Pelaksanaan Workshop Manajemen Keselamatan Kapal.
- 6) Pengajuan usulan ratifikasi konvensi internasional tentang jaminan ganti rugi pencemaran akibat minyak bunker dan system anti teritip.
- 7) Pelaksanaan audit keselamatan kapal di beberapa lokasi pelabuhan Indonesia.





## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah mencapai beberapa keberhasilan pada tahun 2011 ini, antara lain turunnya jumlah kecelakaan yang disebabkan oleh faktor manusia dan meningkatnya jumlah dan share muatan angkutan laut dalam negeri yang diangkut oleh kapal nasional. Namun demikian, masih terdapat beberapa ketidakberhasilan.

Faktor utama penentu berbagai keberhasilan yang sudah dicapai sepanjang tahun 2011 ini adalah adanya komitmen dan dukungan pimpinan serta jajaran Kementerian Perhubungan secara umum dan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut khususnya. Selain itu, dukungan kemampuan SDM yang memadai juga menjadi salah satu penentu keberhasilan pencapaian kinerja di tahun 2011 ini.

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2011 baik eksternal maupun internal yang dihadapi antara lain adalah :

#### **a. Jumlah kejadian Kecelakaan**

Faktor penyebab kejadian kecelakaan yang paling dominan adalah kecelakaan yang disebabkan oleh alam dan teknis. Ditjen Hubla telah mengambil kebijakan dengan meningkatkan pengawasan dan menyampaikan kepada para penanggungjawab keselamatan pelayaran di pelabuhan untuk segera mengirimkan Maklumat Pelayaran tentang Kondisi Cuaca di Perairan Indonesia. Sedangkan untuk mengurangi tingkat kecelakaan yang disebabkan oleh teknis dengan menata penempatan atau pengoperasian kapal sesuai dengan kondisi perairan.



**b. Waiting Time**

Terdapat beberapa pelabuhan komersial yang telah mencapai Waiting Time (WT), Approach Time (AT) dan Waktu Efektif diatas standard kinerja yang telah ditetapkan. Terhadap pelabuhan-pelabuhan tersebut Ditjen Hubla sebagai regulator akan berkoordinasi dengan Pelindo sebagai pengelola pelabuhan komersial (operator) untuk meningkatkan kinerjanya dimana salah satunya adalah penambahan sarana dan prasarana operasional di pelabuhan.

Pada tahun 2011 Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah mengambil beberapa kebijakan dengan melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan Pelindo untuk pelabuhan-pelabuhan yang komersial. Ditjen Hubla juga telah mengeluarkan Surat Keputusan Dirjen Hubla No. UM.002/38/18/DJPL-11 tentang Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan. Selanjutnya akan dilaksanakan monitoring terhadap pencapaian standar kinerja yang telah ditetapkan pada SK Dirjen dimaksud dimana jumlah pelabuhan yang tercantum pada SK dimaksud lebih besar dibanding SK sebelumnya yang hanya mengatur 24 pelabuhan strategis.

**c. Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri masih terkendala.**

Rancangan Peraturan Menteri (RPM) yang terkendala antara lain RPM tentang Pencegahan Pencemaran dari Pengoperasian Kapal. Hal ini disebabkan masih adanya pembahasan yang intensif mengenai Ratifikasi Annex III s/d VI Marpol 73/78.

**d. Kuantitas dan Kualitas SDM yang masih kurang**

Ditjen Hubla masih memiliki keterbatasan pada SDM yang mempunyai kompetensi terkait keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim , antara lain tenaga Marine Inspector, penyelam, tenaga penanggulangan pencemaran dan tenaga penanggulangan kebakaran.



## 4.2 Langkah ke depan

Keberhasilan kinerja yang telah dicapai oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tidak terlepas dari jajaran seluruh unit kerja yang ada. Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, beberapa langkah strategis yang akan dilakukan antara lain adalah :

1. Untuk mengurangi tingkat kecelakaan atau untuk mewujudkan Zero Accident, Ditjen Hubla telah menyusun Road Map to Zero Accident. Beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu:
  - a. Regulasi
  - b. Kelembagaan
  - c. Prasarana
  - d. Sarana
  - e. Sumberdaya Manusia
  - f. Operator
  - g. Masyarakat
  - h. Penegakan Hukum
2. Untuk mengurangi waiting time, Ditjen Hubla telah mengeluarkan Keputusan Dirjen No : UM.002/38/18/DJPL-11 Tentang Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan. Standar kinerja pelayanan digunakan untuk mengetahui tingkat kinerja pelayanan pengoperasian di pelabuhan, kelancaran dan ketertiban pelayanan serta sebagai dasar pertimbangan untuk perhitungan tarif jasa pelabuhan.
3. Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri (RPM) yang terkendala akan menjadi prioritas pada tahun yang akan datang.
4. Ditjen Hubla akan meningkatkan kompetensi SDM dengan melakukan diklat dan pembinaan kepada aparat yang mempunyai tugas pokok dan fungsi terkait keselamatan pelayaran, lingkungan hidup serta kompetensi lain yang dapat mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.



**FORMULIR PENGUKURAN KINERJA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**  
**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

Unit Eselon I : Direktorat Jenderal Perhubungan Laut  
 Tahun : 2011

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>PROSENTASE</b>
<b>( 1 )</b>	<b>( 2 )</b>	<b>( 3 )</b>	<b>( 4 )</b>	<b>( 5 )</b>
Meningkatnya Keselamatan Pelayaran dan Keamanan Transportasi Laut	1.1 Jumlah kejadian kecelakaan yang disebabkan manusia	41 Kejadian kecelakaan	31 Kejadian kecelakaan	132,26 %
	1.2 Jumlah kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh alam	80 Kejadian kecelakaan	99 Kejadian kecelakaan	80,81 %
	1.3 Jumlah kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh teknis dan lain-lain	23 Kejadian kecelakaan	48 Kejadian kecelakaan	47,92 %
	1.4 Jumlah kejadian jenis percobaan perompakan dan pencurian pada transportasi laut	6 Kejadian	6 Kejadian	100 %
Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi laut.	2.1. Jumlah rute perintis yang dilayani transportasi laut	61 Rute	61 Rute	100 %
	2.2. Jumlah voyage perintis yang dilayani transportasi laut	1.420 Voyage	1.010 Voyage	71,13 %
	2.3. Jumlah Kota/daerah yang terhubung oleh transportasi laut	248 Kab / Kota	248 Kab / Kota	100 %

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>PROSENTASE</b>
<b>( 1 )</b>	<b>( 2 )</b>	<b>( 3 )</b>	<b>( 4 )</b>	<b>( 5 )</b>
	2.4. Jumlah wilayah terpencil, daerah perbatasan dan daerah belum berkembang yang dilayani angkutan laut perintis	12 Lokasi	12 Lokasi	100 %
Meningkatnya pelayanan kepelabuhan nasional melalui peningkatan kapasitas pelabuhan	3.1 Jumlah penumpang transportasi laut yang terangkut	5.657.505 Orang	5.657.505 Orang	100 %
	3.2 Jumlah penumpang angkutan laut perintis yang terangkut	225.033 Orang	225.033 Orang	100 %
	3.3 Jumlah muatan angkutan laut dalam negeri yang diangkut oleh kapal nasional	316.489.377 Ton	316.489.377 Ton	100 %
	3.4 Jumlah muatan angkutan laut dalam negeri yang diangkut oleh kapal asing	3.779.169 Ton	3.779.169 Ton	100 %
	3.5 Prosentase pangsa muatan kapal nasional untuk angkutan laut dalam negeri	98,82 %	98,82 %	100 %
	3.6 Prosentase pangsa muatan kapal nasional untuk angkutan laut luar negeri	9,50 %	9,50 %	100 %
	3.7 Prosentase peningkatan produktivitas angkutan laut nasional	3,65 %	3,65 %	100 %

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PROSENTASE
( 1 )	( 2 )	( 3 )	( 4 )	( 5 )
	3.8 Jumlah pelabuhan yang mempunyai pencapaian Waiting Time (WT) masih sesuai standar yang telah ditetapkan	24 Pelabuhan	20 Pelabuhan	83,33 %
	3.9 Jumlah pelabuhan yang mempunyai pencapaian Approach Time (AT) masih sesuai standar yang telah ditetapkan	24 Pelabuhan	18 Pelabuhan	75,00 %
	3.10 Jumlah pelabuhan yang mempunyai pencapaian Waktu Efektif (Effective Time/ET) masih sesuai standar yang telah ditetapkan	24 Pelabuhan	20 Pelabuhan	83,33 %
	3.11 Jumlah kebutuhan pelabuhan yang tidak diusahakan pada wilayah terpencil, terluar, daerah perbatasan a. Jumlah Pembangunan pelabuhan baru dalam rangka membuka outlet yang belum terlayani b. Jumlah Lanjutan Pembangunan Pelabuhan baru dalam rangka menuju keterbukaan outlet	65 Pelabuhan	64 Pelabuhan	98,46 %
		149 Pelabuhan	146 Pelabuhan	97,99 %

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PROSENTASE
( 1 )	( 2 )	( 3 )	( 4 )	( 5 )
	c. Jumlah Pengembangan, rehabilitasi dan replace Fasilitas Pelabuhan dalam rangka pemulihan dan peningkatan Kapasitas Pelabuhan	23 Pelabuhan	23 Pelabuhan	100 %
	d. Jumlah Penyelesaian Pelabuhan baru dalam rangka mengembangkan potensi ekonomi wilayah	25 Pelabuhan	25 Pelabuhan	100 %
Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia serta Administrasi Negara di sektor Transportasi Laut.	4.1. Jumlah kebutuhan tenaga Marine Inspector A	30 Orang	30 Orang	100 %
	4.2. Jumlah kebutuhan tenaga Marine Inspector B	30 Orang	30 Orang	100 %
	4.3. Jumlah kebutuhan tenaga PPNS	30 Orang	30 Orang	100 %
	4.4. Jumlah kebutuhan tenaga Kesyahbandaran Kelas A	60 Orang	60 Orang	100 %
	4.5. Jumlah kebutuhan tenaga Kesyahbandaran Kelas B	120 Orang	120 Orang	100 %
	4.6. Jumlah penyelesaian regulasi	5 RPM 1 Rancangan Keputusan Dirjen	5 RPM 1 Rancangan Keputusan Dirjen	100 % 100 %

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PROSENTASE
( 1 )	( 2 )	( 3 )	( 4 )	( 5 )
Meningkatnya pelayanan dalam rangka perlindungan lingkungan maritim dibidang transportasi laut	5.1. Jumlah Penurunan emisi gas buang (CO2) transportasi laut	1.340,44 Mega Ton	1.340,44 Mega Ton	100 %
	5.2. Jumlah kebutuhan tenaga penanggulangan pencemaran	30 Orang	30 Orang	100 %
	5.3. Jumlah kebutuhan pemilikan sertifikat IOPP (International Oil polution Prevention)	981 Sertifikat	981 Sertifikat	100 %
	5.4. Jumlah kebutuhan pemilikan SNPP (Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran)	1.389 Sertifikat	1.389 Sertifikat	100 %
	5.5. Jumlah kebutuhan pemilikan sertifikat bahan cair beracun (Noxious Liquid Substance)	104 Sertifikat	104 Sertifikat	100 %
	5.6. Peningkatan pemahaman aparat UPT Ditjen Hubla terhadap pembangunan dan operasional pelabuhan yang berwawasan lingkungan	5 UPT	5 UPT	100 %

Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut

Jumlah Anggaran Tahun 2011 : Rp. 7.768.182.346.000  
 Jumlah Realisasi Anggaran Program Tahun 2011 : Rp. 6.534.705.552.344

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	iii
Ikhtisar Eksekutif .....	1
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>I - 1</b>
1.1 Latar Belakang .....	I - 3
1.2 Maksud dan Tujuan .....	I - 3
1.3 Ruang Lingkup .....	I - 3
1.4 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Ditjen Hubla .....	I - 4
 <b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA DITJEN HUBLA TAHUN 2011 .....</b>	 <b>II - 1</b>
2.1 Perencanaan Strategis .....	II - 1
2.2 Perencanaan Kinerja Ditjen Hubla Tahun 2011 .....	II - 13
2.3 Penetapan Kinerja Ditjen Hubla Tahun 2011 .....	II - 25
2.4 Penyesuaian Rencana Ditjen Hubla Tahun 2011 APBN-P dan Penghematan .....	II - 31
2.5 Alokasi Anggaran APBN Pada Masing-Masing Kegiatan Tahun 2011 .....	II - 33
2.6 Kegiatan-Kegiatan Prioritas Ditjen Hubla Tahun 2011 .....	II - 34
 <b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DITJEN HUBLA TAHUN 2011 .</b>	 <b>III - 1</b>
3.1 Pengukuran Capaian Kinerja .....	III - 1
3.2 Pencapaian Kinerja Tahun 2011 Sesuai Revisi Indikator Kinerja Utama Ditjen Hubla Pada PM. 85 Tahun 2010 .....	III - 7

3.3	Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sesuai Revisi	
	Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	III - 10

**BAB IV PENUTUP**

4.1	Kesimpulan.....	IV -1
4.2	Langkah Kedepan .....	IV - 2

Lampiran

## IKHTISAR EKSEKUTIF

### **Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut**

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam menyusun Rencana Strategis senantiasa berorientasi pada hal-hal yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun juga memperhitungkan tingkat kebutuhan, kecukupan, potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul serta tetap mengacu pada rencana Strategis Pembangunan Jangka Menengah yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan khususnya tahun 2010-2014.

#### 1) **Visi dan Misi**

Visi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut adalah : **Terwujudnya pelayanan transportasi yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah.**

#### 2) Misi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut ditetapkan menjadi 5 (lima) misi utama pembangunan yang harus ditempuh sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan kegiatan angkutan di perairan dalam rangka memperlancar arus perpindahan orang/dan atau barang melalui perairan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan berdaya guna;
- b. Menyelenggarakan kegiatan kepelabuhanan yang andal dan berkemampuan tinggi, menjamin efisiensi dan mempunyai daya saing global untuk menunjang pembangunan nasional dan daerah yang berwawasan nusantara;
- c. Menyelenggarakan keselamatan dan kemanan angkutan perairan dan pelabuhan;
- d. Menyelenggarakan perlindungan lingkungan maritim di perairan nusantara;
- e. Melaksanakan konsolidasi peran masyarakat, dunia usaha dan pemerintah melalui restrukturisasi dan reformasi peraturan;

### 3) **Tujuan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut**

Dalam upaya mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut maka dirumuskan tujuan Ditjen Hubla sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas dan produktivitas pelayanan sub sektor perhubungan laut yang aman, nyaman, tepat waktu, terjangkau berdaya saing serta memberikan nilai tambah.
- b. Memperluas jangkauan jaringan pelayanan sub sektor perhubungan laut sampai ke daerah terpencil dan terisolasi dan daerah perbatasan negara.
- c. Meningkatkan pelayanan jasa sarana dan prasarana sub sektor perhubungan laut yang mampu memenuhi kebutuhan minimum dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi.
- d. Meningkatkan kapasitas aparatur negara dan SDM perhubungan laut yang professional, mandiri, bertanggungjawab dan bebas KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) serta menciptakan iklim kompetisi yang sehat dan penegakan hukum;
- e. Memenuhi perlindungan lingkungan maritim dengan upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran

### 4) **Sasaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut**

Sasaran Ditjen Hubla dirumuskan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pelayanan keselamatan pelayaran dan keamanan transportasi laut;
- b. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi laut
- c. Meningkatnya pelayanan kepelabuhanan nasional melalui peningkatan kapasitas pelabuhan;
- d. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia serta administrasi negara di sektor transportasi laut;
- e. Meningkatnya Pemeliharaan dan Kualitas Lingkungan Hidup serta Penghematan Penggunaan Energi di bidang transportasi laut

5) **Kendala-Kendala Dalam Pencapaian Target Kinerja**

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2011 baik eksternal maupun internal yang dihadapi antara lain adalah :

**a. Masih meningkatnya Jumlah Kecelakaan**

Faktor penyebab yang paling dominan adalah kecelakaan yang disebabkan oleh alam dan teknis. Ditjen Hubla telah mengambil kebijakan dengan meningkatkan pengawasan dan menyampaikan kepada para penanggungjawab keselamatan pelayaran di pelabuhan untuk segera mengirimkan Maklumat Pelayaran tentang Kondisi Cuaca di Perairan Indonesia. Sedangkan untuk mengurangi tingkat kecelakaan yang disebabkan oleh teknis dengan menata penempatan atau pengoperasian kapal sesuai dengan kondisi perairan.

**b. Waiting Time yang masih meningkat**

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut belum berhasil menurunkan waiting time di pelabuhan pada tahun 2011, dan untuk mencapai penurunan waiting time telah diambil beberapa kebijakan dengan melakukan koordinasi yang lebih intensi dengan Pelindo untuk pelabuhan-pelabuhan yang komersial.

**c. Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri masih terkendala.**

Rancangan Peraturan Menteri (RPM) yang terkendala antara lain RPM tentang Pencegahan Pencemaran dari Pengoperasian Kapal. Hal ini disebabkan masih adanya pembahasan yang intensif mengenai Ratifikasi Annex III s/d VI Marpol 73/78.

**d. Kuantitas dan Kualitas SDM yang masih kurang**

Ditjen Hubla masih memiliki keterbatasan pada SDM yang mempunyai kompetensi terkait keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim , antara lain tenaga Marine Inspector, penyelam, tenaga penanggulangan pencemaran dan tenaga penanggulangan kebakaran.

## 6) **Langkah ke depan**

Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, beberapa langkah strategis yang akan dilakukan antara lain adalah :

- a. Untuk mengurangi tingkat kecelakaan atau untuk mewujudkan Zero Accident, Ditjen Hubla telah menyusun Road Map to Zero Accident. Beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu:
  - Regulasi
  - Kelembagaan
  - Prasarana
  - Sarana
  - Sumberdaya Manusia
  - Operator
  - Masyarakat
  - Penegakan Hukum
- b. Untuk mengurangi waiting time, Ditjen Hubla telah mengeluarkan Keputusan Dirjen No : UM.002/38/18/DJPL-11 Tentang Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan. Standar kinerja pelayanan digunakan untuk mengetahui tingkat kinerja pelayanan pengoperasian di pelabuhan, kelancaran dan ketertiban pelayanan serta sebagai dasar pertimbangan untuk perhitungan tarif jasa pelabuhan. Selanjutnya akan dilaksanakan monitoring terhadap pencapaian standar kinerja yang telah ditetapkan pada SK Dirjen dimaksud. Kebijakan lainnya adalah direncanakan pengadaan peralatan di pelabuhan terutama pada pelabuhan yang cukup padat dan mempunyai waiting time tinggi.
- c. Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri (RPM) yang terkendala akan menjadi prioritas pada tahun yang akan datang.

- d. Ditjen Hubla akan meningkatkan kompetensi SDM dengan melakukan diklat dan pembinaan kepada aparat yang mempunyai tugas pokok dan fungsi terkait keselamatan pelayaran serta kompetensi lain yang dapat mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.